



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Hasanudin No.10 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

Telp : (0532) 22418 E-mail : disperkim@kotawaringinbaratkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dan dapat menjadi perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, terlepas dari masih adanya kelemahan dan hambatan, namun kiranya semoga laporan ini merupakan perwujudan dari kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 yang pada tahun mendatang akan selalu ditingkatkan.

Pangkalan Bun, Februari 2025



**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 19651225 199303 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)	Ket
			2024	2024		
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan	Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	68,88	66,12	95,99	Sangat Tinggi
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,94	97,92	99,98	Sangat Tinggi
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71	0,44	5,05	Sangat Rendah
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa Dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 dan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati

Kotawaringin Barat Nomor : 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimana target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 68,88 dan realisasi sebesar 66,12 dengan capaian 95,99%, meskipun ada salah satu indikator yang kinerjanya sangat rendah, namun secara akumulatif kriteria kinerja adalah **“sangat tinggi”**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Bertambahnya jumlah baglog rumah setiap tahun sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan rumah layak huni bagi warga;
- b. Adanya penugasan mandatory sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki.
- c. Berkembangnya kawasan dan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga diperlukan monitoring dan penataan wilayah dan kawasan yang ada.
- d. Optimalisasi kerjasama dan kolaborasi dengan pihak eksternal perlu semakin di tingkatkan.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Data Umum	2
1.3 Aspek Strategis	8
1.4 Permasalahan Utama	10
1.5 Landasan Hukum	11
1.6 Sistematika Penyajian	12
BAB II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	14
2.2 Indikator Kinerja Utama	16
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	17
2.4 Perjanjian Kinerja	18
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	27
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27
3.2 Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi	53
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
3.5 Realisasi Keuangan	55
BAB IV Penutup	59
Lampiran-Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Peta Jabatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3	
Tabel 1.2	Data Pegawai Per 31 Desember 2024	5
Tabel 1.3	Analisis Kebutuhan Pegawai 2024	5
Tabel 1.4	Data Aset Tahun 2024	7
Tabel 1.5	Analisis SWOT terhadap Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023 - 2026	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	19
Tabel 2.5	Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Daerah	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024	29
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	30
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah	31
Tabel 3.6	Rekapitulasi Sebaran RTLH di Kab. Ktw. Barat Tahun 2024	32
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024	37
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024 dan Perbandingan dengan tahun sebelumnya	38
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan target Kinerja dengan target Jangka menengah Renstra tahun 2023 - 2026	38
Tabel 3.10	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/19/PERKIM.III/2024	39

Tabel 3.11 Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2024	41
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024	48
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	49
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra 2023 - 2026	50
Tabel 3.13 Efisiensi sumber daya.....	54
Tabel 3.14 Kegiatan Lintas Sektoral	55
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2024	55
Tabel 3.16 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pohon kinerja (logframe) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14
Gambar 2.2	Sistem Aplikasi e-rlth Kementerian PUPR	22
Gambar 2.3	Sistem Aplikasi SIBARU Kementerian PUPR	23
Gambar 2.4	Sistem Aplikasi SI-RUTILAHU sebelum perubahan	24
Gambar 2.5	Sistem Aplikasi SI-RUTILAHU setelah perubahan	25
Gambar 2.6	Sistem Aplikasi SiPASU	26
Gambar 3.1	Pelaksanaan kegiatan penanganan RTLH 2024	33
Gambar 3.2	Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Pengajuan Rekomendasi Siteplan 2024	51
Gambar 3.3	Baseline dan target nasional rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
Kepala Dinas	Pranata SDM Aparatur	
Sekretaris, yang membawahi :		
Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaah Teknis Kebijakan - Pengolah Data dan Informasi - Pengadministrasi Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencana Ahli Pertama - Pranata Komputer Ahli Pertama
Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaah Teknis Kebijakan - Pengolah Data dan Informasi - Pengadministrasi Perkantoran - Operator Layanan Operasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pranata SDM Aparatur - Arsiparis Terampil
Bidang Perumahan Rakyat yang membawahi :	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaah Teknis Kebijakan - Pengolah Data dan Informasi - Pengadministrasi Perkantoran - Teknisi Sarana dan Prasarana - Penata Bangunan Gedung dan Permukiman - Pengawas Jaringan Utilitas 	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, yang membawahi	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaah Teknis Kebijakan - Pengolah Data dan Informasi - Pengadministrasi Perkantoran - Teknisi Sarana dan Prasarana - Penata Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman - Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman 	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
Bidang Pertanahan, yang membawahi :	<ul style="list-style-type: none"> - Penelaah Teknis Kebijakan - Pengolah Data dan Informasi - Pengadministrasi Perkantoran - Teknisi Sarana dan Prasarana - Penata Kelola Pengadaan Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penata Ruang Ahli Muda - Surveyor Pemetaan Ahli Muda - Surveyor Pemetaan Ahli Pertama

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomenklatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, namun Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan, dikarenakan menunggu disahkannya perubahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 47 Pegawai yang terdiri dari 20 orang berstatus pegawai negeri dan 27 orang berstatus tenaga kontrak daerah orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1			1				1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	4	4		2	2				4	
	2. Pengawas	2	2			2				2	
	3. Pelaksana	7	3	4	1	1	1	4		7	
	4. TKD	27	16	11		11		7	9	0	27
C	Jabatan Fungsional	6	5	1	1	4	1			6	
	Jumlah	47	31	16	4	21	2	11	9	20	27

Sumber: Data Pegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Per 31 Desember 2024

Kebutuhan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2024

Uraian	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat					
Kepala Subbagian Tata Usaha	Pranata SDM Aparatur Terampil		2	0	2
	Arsiparis Terampil		1	0	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
		Pengolah data dan Informasi	1	0	1
		Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3
		Operator Layanan Operasional	3	0	3

Uraian	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	kekurangan
Kepala bagian Penyusunan Program, Anggaran Akuntansi	Sub				
		Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
	dan	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
		Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	2
		Pengolah Data dan Informasi	2	1	1
		Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2
Bidang Perumahan Rakyat		Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	3	3	0
		Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	3
		Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
		Pengadministrasi Perkantoran	5	0	5
		Teknisi Sarana dan Prasarana	3	0	3
		Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	5	0	5
		Pengawas jaringan Utilitas	4	0	4
Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman					
		Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	3	0	3
		Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	3
		Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
		Pengadministrasi Perkantoran	5	1	4
		Teknisi Sarana dan Prasarana	3	0	3
		Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	5	0	5
		Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	5	0	5

Uraian	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	kekurangan
Bidang Pertanahan					
	Penata Ruang Ahli Muda		3	3	0
	Surveyor Pemetaan Ahli Muda		2	0	2
	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama		1	0	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	3
		Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
		Pengadministrasi Perkantoran	3	1	2
		Teknisi Sarana dan Prasarana	3	0	3
		Penata Kelola Pengadaan Tanah	4	0	4
TOTAL			93	13	80

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2024, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2024

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	644	50.564.390.685,00
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	0	-
		Alat-alat Angkut	7	476.864.600,00
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	101.394.980,00
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	315	577.885.824,00
		Alat Studio Komunikasi	8	53.240.000,00
		Alat Laboratorium	0	-
		Alat Persenjataan	1	6.520.250,00
		Alat Komputer	58	382.792.180,00
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	29	2.595.860.480,00
		Monumen	8	1.489.684.500,00

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	40	5.639.495.912,00
		Gedung Rumah Dinas	0	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	457	95.064.782.340,72
		Jembatan	11	1.744.978.147,01
		Bangunan Air	29	4.154.807.978,00
		Jaringan	2	82.700.000,00
		Instalasi Listrik dan Telp	0	-
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	1	226.187.500,00
		Barang Bercorak Kesenian	0	-
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	5	934.992.170,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		3	15.446.500,00

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2024

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

- Keterbatasan ketersediaan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang terus meningkat baik karena kelahiran maupun adanya migrasi dari luar.
- Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman.
- Aspek Kesesuaian Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Fungsi Kawasan Pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (Perumahan Permukiman yang Berada di Kawasan Rawan Bencana)
- Perlu adanya deliniasi Kawasan Kumuh, Demi menyelaraskan program MDG's Tahun 2020 yaitu city without slum, maka seluruh pemerintahan

kota/ kabupaten diwajibkan untuk memiliki dokumen deliniasi kawasan kumuh.

- f. Kurangnya komitmen, koordinasi dan sinergisitas terpadu terhadap semua instansi dalam mensukseskan program penuntasan/penanganan kawasan kumuh, dimana program kegiatan SKPD pengampu tujuh aspek penentu kawasan kumuh belum memiliki rencana kerja dan lokus yang sama.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Bappeda kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/ kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. **Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **Ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari

lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 1.5
Analisis SWOT terhadap Isu-isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	KELEMAHAN
		Cadangan Lahan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman masih cukup	Aspek Kesesuaian Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman
PELUANG		Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman	Terbatasnya dana pemerintah
		alternatif kebijakan 1	alternatif kebijakan 2
	Program Nasional Tiga juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat	Pengoptimalan peran dan fungsi lembaga dan stake holder terkait dalam kerjasama dan pembiayaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.	Mengoptimalkan Penggunaan Lahan Sesuai Peruntukan RTRW untuk pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman
	Visi dan Misi Perumahan dan Permukiman		
		(I)	(II)
ANCAMAN		alternatif kebijakan 3	alternatif kebijakan 4
	Kawasan Kumuh	Melaksanakan penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman bersama dengan stakeholder terkait	Mengembangkan skema pembiayaan perumahan dengan pola kerjasama kelembagaan multi sektoral dengan Badan Usaha maupun dengan Masyarakat
	Backlog Hunian		
		(IV)	(III)

1.4 Permasalahan Utama

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan personil (Sumber Daya Manusia) di bidang Teknis dengan jenjang pendidikan S1
2. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Tidak seimbangnya antara Tugas dan Fungsi dengan kewenangan yang diberikan.
4. Sarana dan prasarana kerja yang masih minim, untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi; gedung ruang kantor, meubelair, sarana transportasi dan peralatan perkantoran;
5. Kurangnya personil SDM ditingkat pelaksana administrasi

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 92 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi
- 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.5 Realisasi Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah 2023 – 2026 yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dokumen transisi dimna Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Bupati/Kepala Daerah definitif.

Berdasarkan visi dan misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta memperhatikan tantangan dan peluang serta serta isu-isu strategis yang telah ditentukan dalam bab sebelumnya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat selama 4 (empat) tahun ke depan yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Selain itu dari tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan juga dapat disusun pohon kinerja (*logframe*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gambar 2.1 pohon kinerja (*logframe*)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



2.1.1 Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung misi Rencana Pembangunan Daerah, khususnya pada misi ke-2 yaitu “Mempercepat kecukupan infrastruktur secara integratif dan komprehensif dalam pembangunan daerah, dengan memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”, maka disusun lah tujuan Renstra 2023 – 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Pertanian.
2. Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023 - 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target			
			2023	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanian	Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanian	68,74%	68,88%	69,00%	69,17%
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,55%	97,94%	98,25%	98,71%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,76%	8,71%	8,75%	8,79%

ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%	100%
T2	Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	98,50%	99,00%	100%	100%

Sumber: Renstra Disperkim 2023 - 2026

2.1.2 Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman
2. Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten
3. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dimana IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan melalui Renstra serta di tuangkan kembali melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan di perkuat kembali melalui Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor : 800/011.A/PERKIM.I/2023 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target			
			2023	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan	Indeks Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	68,74%	68,88%	69,00%	69,17%
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,55%	97,94%	98,25%	98,71%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,67%	8,71%	8,75%	8,79%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%	100%

Sumber: SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman No: 800/011.A/PERKIM.I/2023

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan

kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan	Indeks Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	68,88
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,94
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100,00

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanian	Indeks Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanian	68,88
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,94
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.5 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian
	Nama Program	Tolak Ukur Kinerja	Satuan		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Masukan: Dana	Rp	4.729.576.640	4.583.085.376
		Persentase capaian penunjang perangkat daerah	Persen	99 %	100%
		Belanja Unit Kerja	Rp	4.729.576.640	4.583.085.376
2	PROGRAM PENGEMBAN	Masukan : Dana	Rp	499.805.778	42.043.851

No.	PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian
	Nama Program	Tolak Ukur Kinerja	Satuan		
	GAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana atau relokasi program	Persen	100 %	0%
		Belanja Unit Kerja	Rp	499.805.778	42.043.851
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Masukan : Dana	Rp	12.387.719.891	12.378.392.331
		Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Persen	1,50 %	0,44%
		Belanja Unit Kerja	Rp	12.387.719.891	12.378.392.331
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Masukan : Dana	Rp	299.450.200	294.760.200
		Persentase kawasan permukiman yang tertangani	Persen	8,84 %	0,44
		Belanja Unit Kerja	Rp	299.450.200	294.760.200
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Masukan : Dana	Rp	14.667.612.151	14.239.263.003
		Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	Persen	99 %	98,61%
		Belanja Unit Kerja	Rp	14.667.612.151	14.239.263.003
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Masukan : Dana	Rp	203.224.650	193.984.050
		Persentase jumlah sengketa yang ditangani	Persen	100 %	100%
		Belanja Unit Kerja	Rp	203.224.650	193.984.050
7	PROGRAM PENYELESAI	Masukan : Dana	Rp	60.589.900	52.150.171

No.	PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian
	Nama Program	Tolak Ukur Kinerja	Satuan		
	AN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase sengketa ganti rugi tanah yang diselesaikan	Persen	100 %	75%
		Belanja Unit Kerja	Rp	60.589.900	52.150.171
8	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Masukan : Dana	Rp	344.496.790	268.549.035
		Persentase bidang tanah pemda yang didaftarkan sertifikasi	Persen	42,59 %	100%
		Belanja Unit Kerja	Rp	344.496.790	268.549.035

Sumber: Data diolah

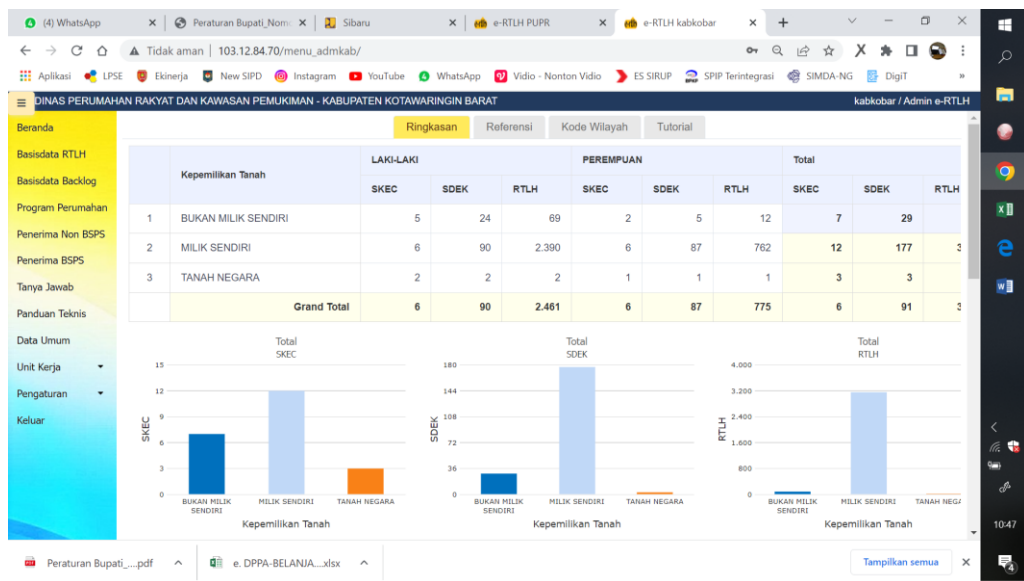
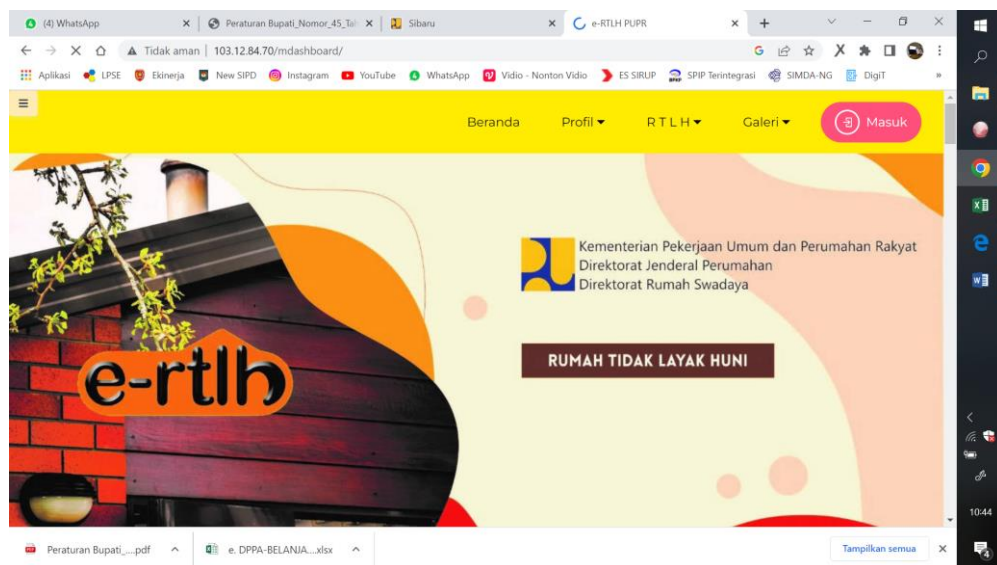
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. e-rtlh

Aplikasi yang menjadi salah satu sumber data terkait RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang di kelola oleh Tim Pengelola dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota.

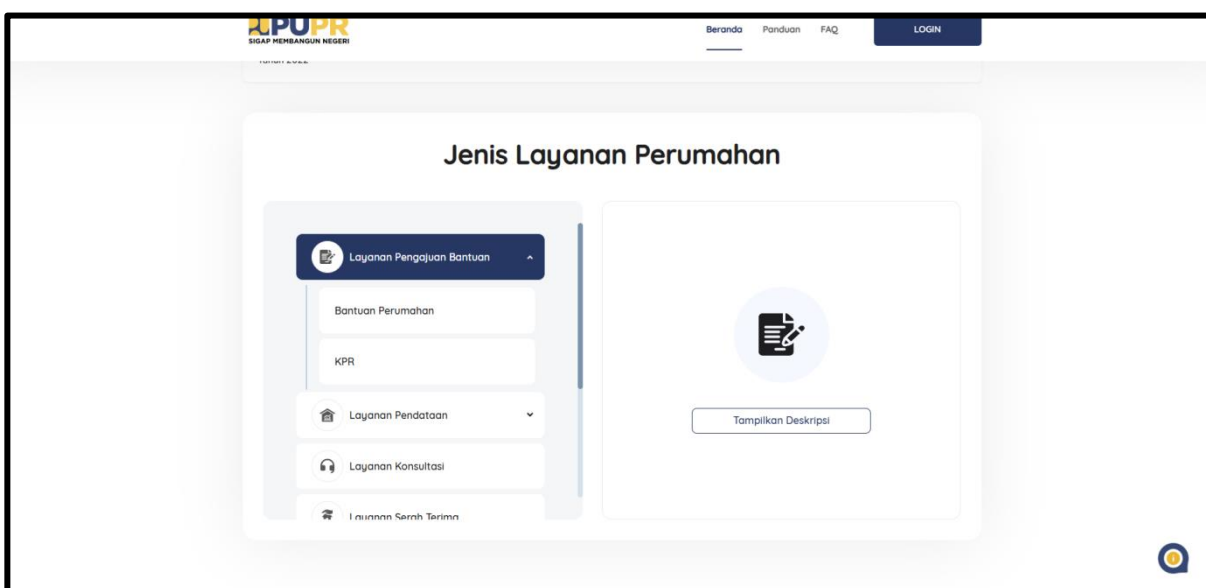
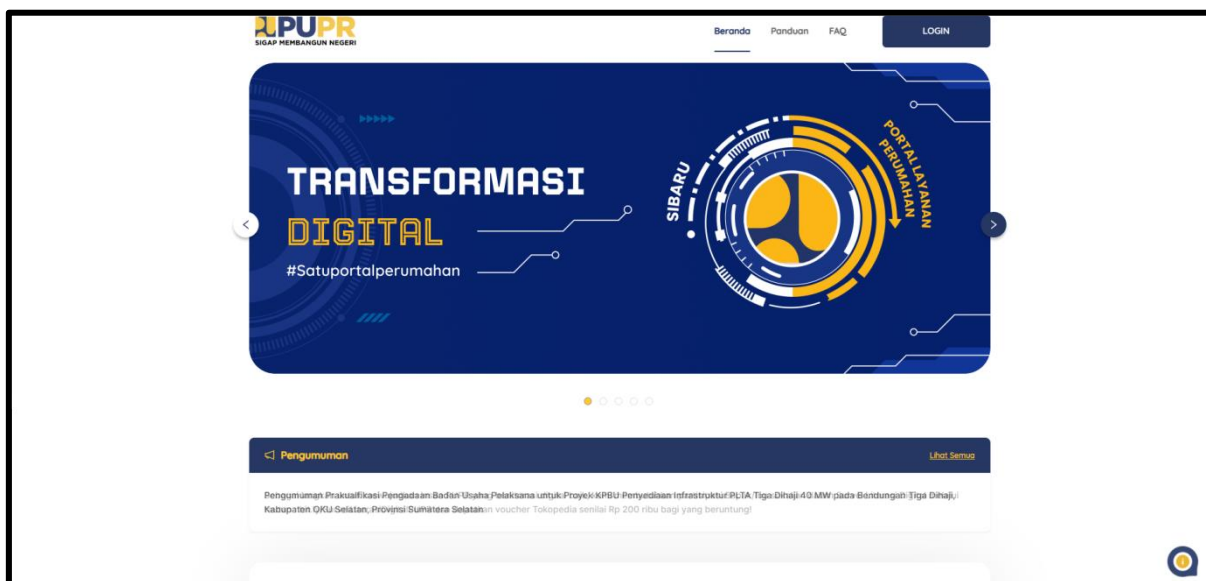
Gambar 2.2 Sistem Aplikasi e-rtlh Kementerian PUPR



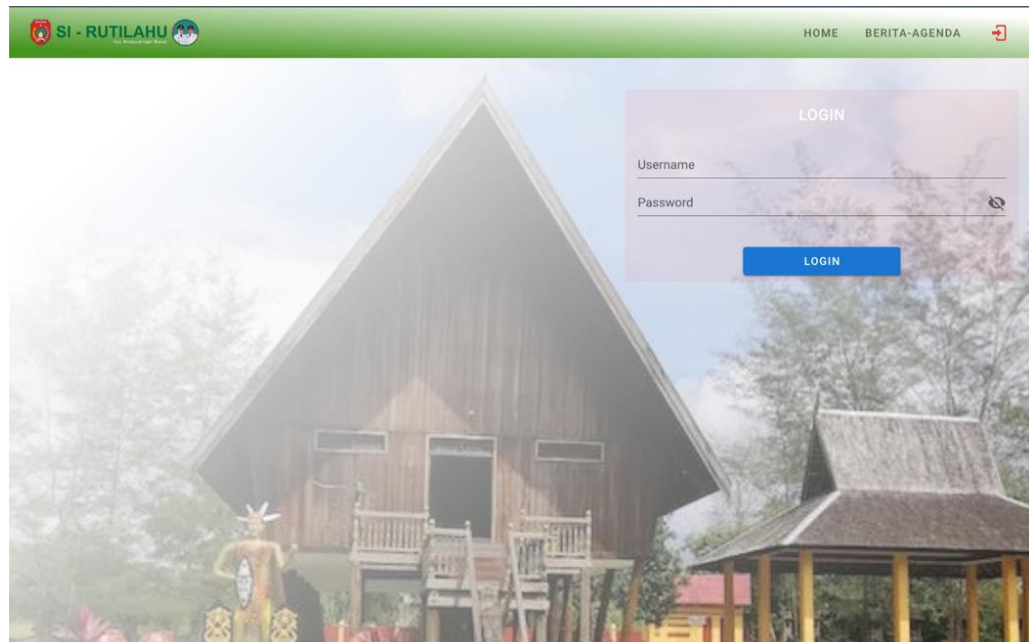
2. SIBARU

Aplikasi untuk pengusulan kegiatan dan paket pekerjaan untuk perumahan dan pengembangan kawasan perumahan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR dan dapat di akses oleh Kabupaten/Kota.

Gambar 2.3 Sistem Aplikasi SIBARU Kementerian PUPR

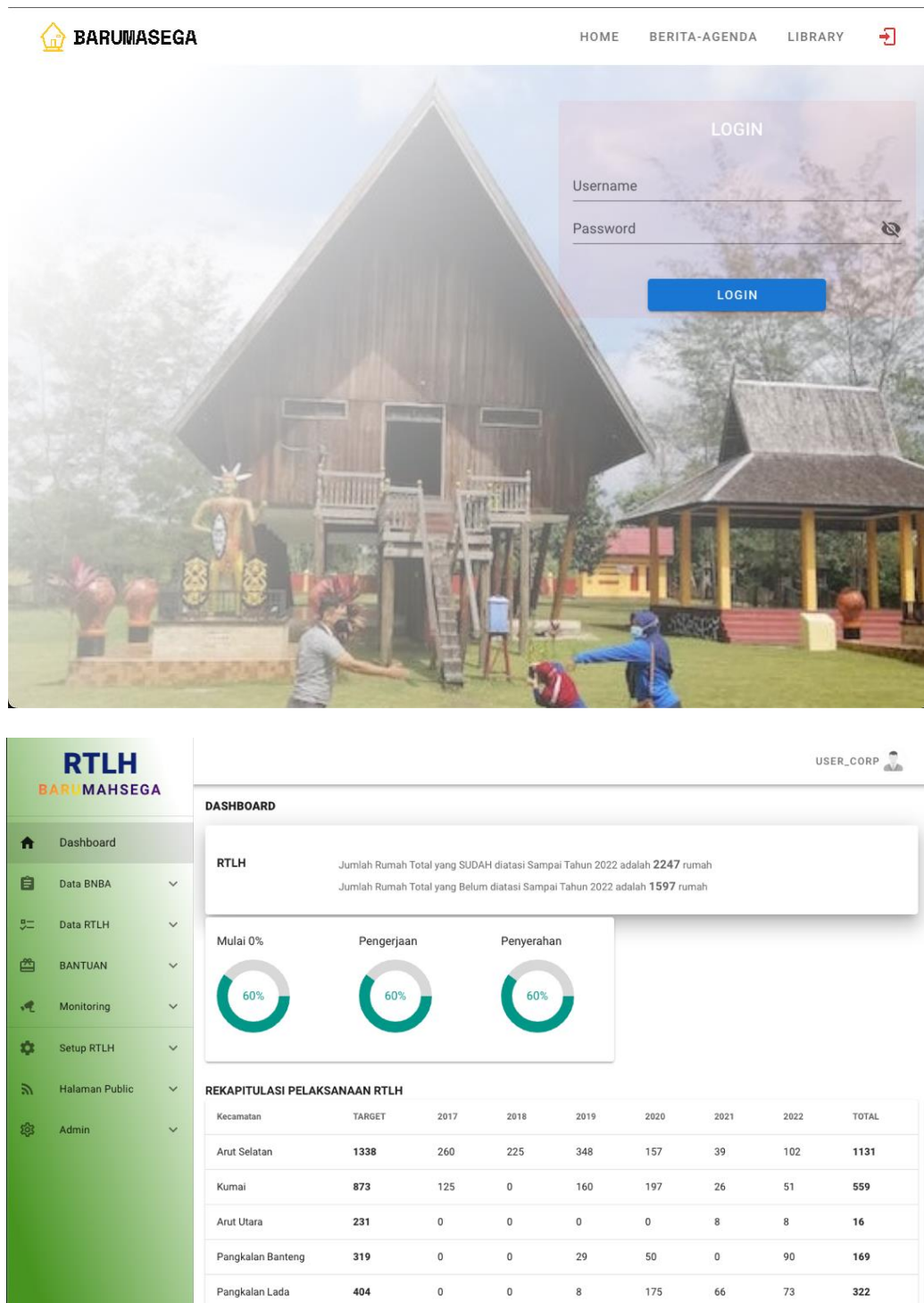


Gambar 2.4 Sistem Aplikasi SI-RUTILAHU sebelum perubahan



Pada awal tahun 2024, Tampilan Aplikasi SI-RUTILAHU mengalami perubahan dengan menu utama dibuat sederhana mungkin, Tidak semua pengguna dapat mengakses menu lengkap aplikasi sesuai dengan tipe pengguna sistem dan hak aksesnya yang sesuai dengan level otorisasinya.

Gambar 2.5 Sistem Aplikasi SI-RUTILAHU setelah perubahan

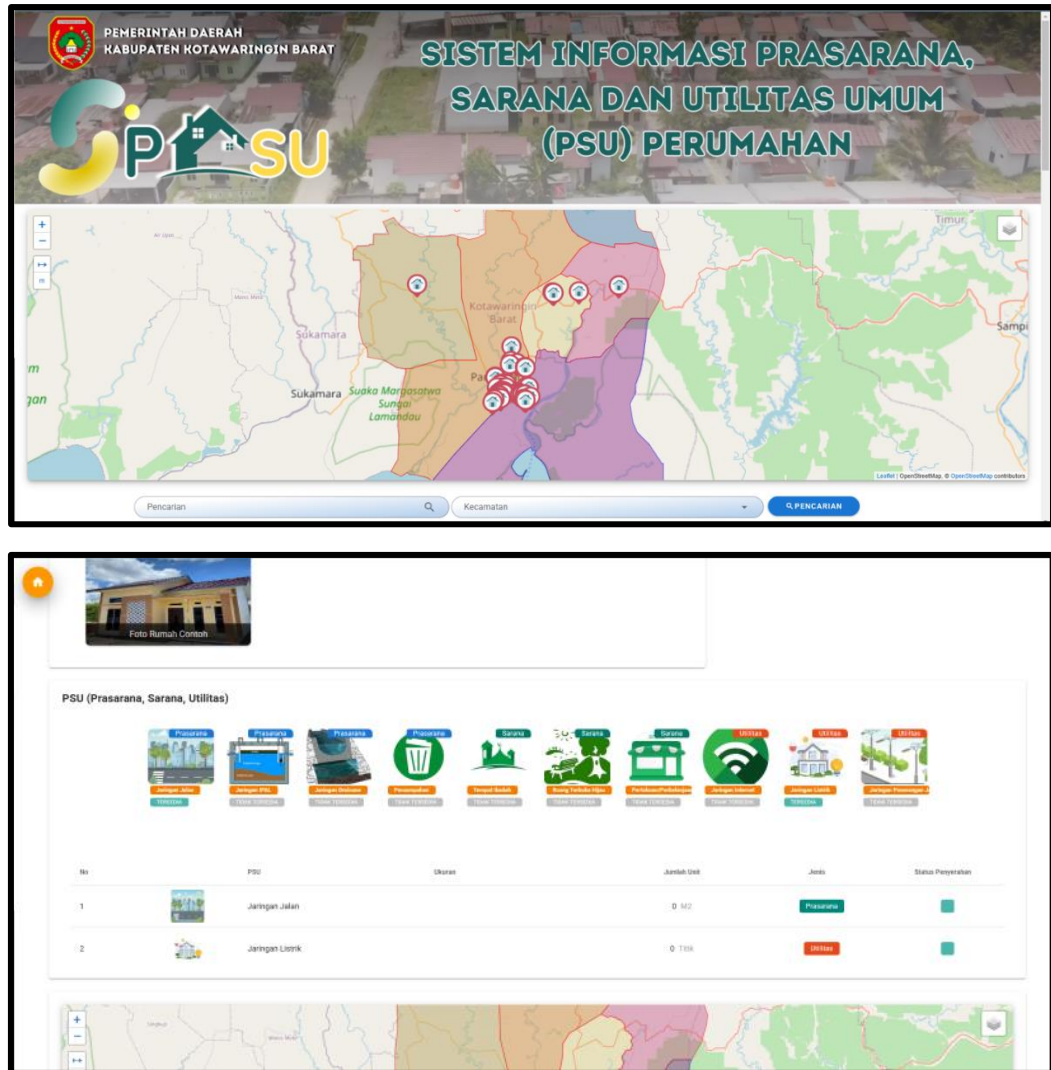


4. SiPASU (Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Aplikasi ini bertujuan untuk merekap perumahan yang telah menyerahkan aset PSU kepada Pemerintah Daerah berbasis WebGIS, selain itu juga aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui

jumlah perumahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kedepannya untuk peningkatan kualitas penggunaan aplikasi SiPASU ini, akan bermanfaat bagi pengembang yang ingin mempromosikan perumahan yang akan di bangun agar memudahkan masyarakat dalam memilih perumahan yang sesuai dengan keinginan.

Gambar 2.6 Sistem Aplikasi SiPASU



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2024 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 1 Tujuan dengan 1 indikator tujuan, serta 2 Sasaran dengan 3 indikator sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Capaian	Persentase Capaian (%)
			2024	2024	
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanahan	Indeks Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	68,88	66,12	95,99
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,94	97,92	99,98
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71	0,44	5,05
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data diolah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 dan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimana target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 68,88 dan realisasi sebesar 66,12 dengan capaian 95,99 %, meskipun ada salah satu indikator yang kinerjanya sangat rendah, namun secara akumulatif kriteria kinerja adalah **“sangat tinggi”**.

Nilai Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperoleh dari perhitungan (Persentase perumahan layak huni + persentase penataan kawasan kumuh + persentase pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya)/3. Adapun indikator sasaran yang merupakan urusan perumahan dan permukiman tersebut adalah sebagai berikut:

❖ **Sasaran 1 (satu): Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman.**

Keberhasilan sasaran 1 (satu) diukur dengan 2 (dua) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

1. Persentase Rumah Layak Huni

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target indikator Persentase rumah layak huni tersaji pada tabel berikut:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rumah Layak Huni	Persen	97,94	97,92	99,98

Sumber: Data diolah

Formulasi Perhitungan:

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$$

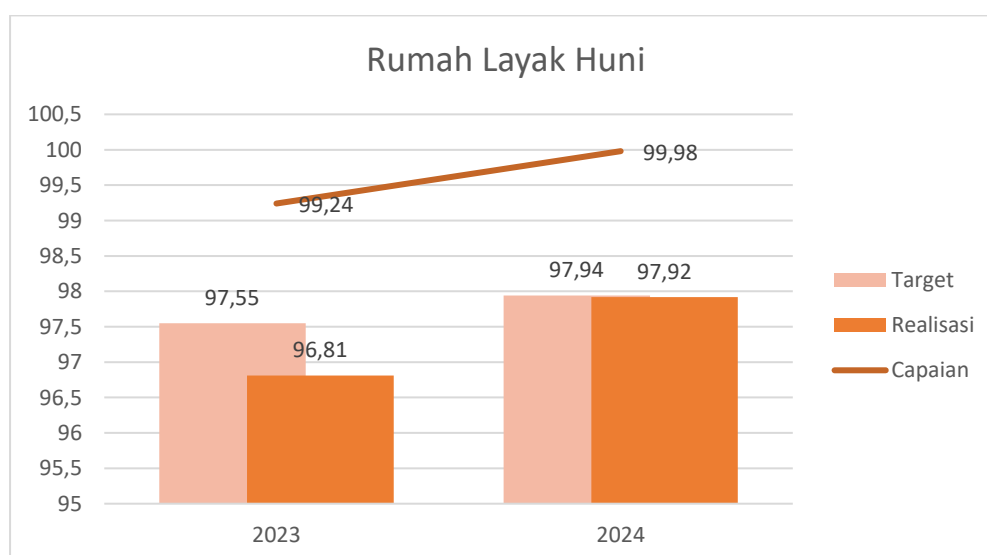
$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{64.874}{66.248} \times 100 = 97,92$$

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan indikator persentase rumah layak huni pada tahun 2024 adalah tidak tercapai dengan capaian kinerja hanya sebesar 99,98% dari target, yaitu dengan realisasi hanya sebesar 97,92 dari target yang sebesar 97,94, namun secara kriteria capaian tersebut **“sangat tinggi”**

Indikator persentase rumah layak huni adalah indikator baru di awal pelaksanaan Renstra 2023 – 2026 yang merupakan salah satu variabel pembentuk Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adapun perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan indikator lama yaitu persentase cakupan rumah layak huni sebagai mana tersaji pada tabel berikut:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Capaian Kinerja (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,48	96,61	97,7	-	-	100,5	99,6	98,69	-	-
Persentase rumah layak huni	-	-	-	96,81	97,92	-	-	-	99,24	99,98



Dari tabel dan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa indikator persentase rumah layak huni baru di ukur pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 terdapat kenaikan realisasi dari 96,81% menjadi 97,92 %.

Berdasarkan Permenpera RI No. 22/PERMEN/M/2008, Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan bangunanya, meliputi struktur bawah bangunan/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok serta struktur atas/ atap, pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase Rumah Layak Huni	Persen	98,71	97,92	99,93

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi masih sedikit di bawah target akhir Renstra yang telah ditetapkan dengan selisih 0,79%. Namun, dengan capaian sebesar 99,93%, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja dalam pencapaian rumah layak huni sudah sangat mendekati target yang direncanakan, dengan demikian capaian kinerja mengindikasikan bahwa meskipun realisasi belum mencapai target secara penuh, tingkat pencapaiannya masih sangat tinggi dibandingkan dengan target akhir renstra yang telah direncanakan.

Dalam pencapaian target dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu adanya penambahan jumlah rumah, penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan penambahan jumlah rumah layak huni di kabupaten kotawaringin barat. Peningkatan jumlah rumah layak huni tersebut dapat tercapai melalui kegiatan penyediaan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni (RLH) yang disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui dana APBD dan keterlibatan TNI dalam kegiatan TMMD. Total keseluruhan peningkatan RTLH menjadi RLH tahun 2024 sejumlah 78 unit dengan menggunakan dana APBD, dengan rincian sebaran RTLH keseluruhan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel: 3.6 Rekapitulasi Sebaran RTLH di Kab. Ktw. Barat Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	RTLH	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni
1	Kecamatan Arut Selatan	163	29.152	28.989
2	Kecamatan Kumai	264	11.840	11.576
3	Kecamatan Pangkalan Lada	27	9.707	9.680
4	Kecamatan Pangkalan Banteng	93	8.598	8.505
5	Kecamatan Arut Utara	213	1.909	1.696
6	Kecamatan Kotawaringin Lama	614	5.042	4.428
TOTAL		1.374	66.248	64.874

Tidak tercapainya target pada tahun 2024 juga dihadapi beberapa kendala selama proses pelaksanaan, beberapa kendala tersebut sebagai berikut:

1. Terjadi ketidaksesuaian data identitas penerima bantuan yang diusulkan dengan hasil pendataan verifikasi lapangan;
2. Adanya kendala kerjasama antara suplayer dengan penerima bantuan;
3. Kurangnya swadaya dari masyarakat (perihal dana tambahan ataupun tukang) penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Belum maksimalnya peran serta pengembang swasta (REI) dan lembaga pembiayaan perumahan (perbankan) dalam pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator sasaran kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan layanan SiRutilahu (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni), aplikasi yang menjadi salah satu sumber data terkait RTLH yang dikelola oleh tim pengelola dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota

dimana saat ini terdata 1.374 rumah tidak layak huni yang perlu segera di tangani.

2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lintas sektor baik instansi vertikal maupun lembaga swasta, melalui peninjauan CSR maupun kerjasama lainnya dimana tahun ini bekerja sama dengan TNI untuk kolaborasi penanganan RTLH sebanyak 3 unit, kerjasama dengan Polres Kotawaringin Barat sebanyak 2 unit, dan kerjasama dengan Baznas Kotawaringin Barat sebanyak 5 unit.
3. Pengajuan Usulan Bantuan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kepada Kementrian PUPR dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan.
4. Mengajukan usulan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melalui Bantuan Kementrian PUPR untuk Peningkatan Kualitas PSU Perumahan.
5. Telah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bertujuan untuk menginventarisir potensi masalah yang terjadi di lapangan dimana pada tahun 2024 telah dilaksanakan 3 periode monitoring.



Gambar: 3.1 Pelaksanaan kegiatan penanganan RTLH 2024

Strategi/Faktor yang akan mendukung keberhasilan peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan integritas Kepala Daerah dalam bentuk peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peningkatan

Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

2. Peningkatan peran serta masyarakat terutama dalam penyediaan sumber dana swadaya dalam program BSPS dan sifatnya stimulan sehingga tanpa adanya peran masyarakat penerima bantuan, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar;
3. Peningkatan peran serta pengembang swasta (REI) dan lembaga pembiayaan perumahan (perbankan) dalam pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
4. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak lintas sektor baik instansi vertikal maupun lembaga swasta, melalui peninjauan CSR maupun kerjasama lainnya serta adanya kegiatan penyediaan peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni (RLH) yang disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui dana APBD dan keterlibatan TNI dalam kegiatan TMMD, dengan total keseluruhan peningkatan RTLH menjadi RLH tahun 2024 sejumlah 73 unit dengan menggunakan dana APBD.

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung maupun yang tidak efektif dalam pencapaian indikator tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan data dan identifikasi perumahan di daerah rawan bencana, serta sosialisasi kepada masyarakat terdampak bencana calon penerima bantuan rehabilitasi rumah korban bencana, sehingga kegiatan ini efektif dalam mendukung pencapaian

indikator.

- b. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, pembangunan Rumah bagi korban bencana dengan mekanisme relokasi, pada Tahun 2024 kegiatan ini **tidak efektif** dalam mendukung pencapaian target indikator dikarenakan belum dapat dilaksanakan, meskipun anggaran telah tersedia. Hal ini disebabkan perbedaan antara data penerima bantuan yang diusulkan oleh desa dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung ketersediaan data kebutuhan PSU Perumahan, maupun terkait koordinasi pengusulan bantuan Rumah dan PSU bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik ke Provinsi Kalimantan Tengah maupun ke Kementerian PU dan Kementerian PKP, Kegiatan ini **efektif** dalam mendukung capaian indikator.
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, kegiatan ini dilaksanakan dalam menyediakan PSU di Lingkungan Perumahan dan Lingkungan dalam rangka mendukung tingkat layak hunian rumah, adapun pada tahun 2024 telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, di 71 Lokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan ini **efektif** mendukung capaian indikator dikarenakan dalam pemenuhan standar rumah layak huni juga wajib didukung dengan sarana PSU yang baik, meskipun dikarenakan keterbatasan, penyediaan PSU dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, pada tahun 2024 kegiatan telah dilaksanakan penyaluran Bantuan Rehabilitasi RTLH di luar kawasan kumuh sebanyak 12 Unit, jumlah ini tentunya **kurang efektif** dalam mendukung capaian target indikator dikarenakan dengan keterbatasan anggaran.
4. Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan kumuh sebanyak 57 Unit Rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan demikian Kegiatan ini juga masih **kurang efektif** dalam mendukung capaian target indikator dikarenakan dengan keterbatasan anggaran, mengingat jumlah Rumah Tidak Layak Huni per Desember 2024 masih ada 1.379 Rumah.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

1. Memastikan kebenaran identitas pada usulan/proposal RTLH yang disampaikan desa/kelurahan sudah sesuai dengan data dilapangan
2. Meningkatkan kerjasama penanganan RTLH dengan sektor swasta, BUMN, BUMD serta lembaga lainnya, dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam penyelesaian perbaikan RTLH.
3. Melaksanakan update data RTLH per wilayah desa/kelurahan sebagai database rencana penanganan RTLH.
4. Melaksanakan Penyusunan Data Pemenuhan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat.

2. Persentase Penataan Kawasan Kumuh

Persentase penataan kawasan kumuh dengan target pada tahun 2024 sebesar 8,71 dan tercapai sebesar 0,44 atau dengan persentase capaian 5,05% sehingga target ini tidak tercapai dan mendapat kriteria kinerja “**sangat rendah**”. Nilai realisasi capaian persentase penataan kawasan kumuh diperoleh dari (Total Luas Permukiman Kumuh yang tertangani/Luas Kumuh) x 100.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target indikator persentase rumah layak huni tersaji pada tabel berikut:

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Penataan Kawasan Kumuh	Persen	8,71	0,44	5,05

Sumber: Data diolah

Formulasi Perhitungan:

$$\text{Persentase Penataan Kawasan Kumuh} = \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Yang ditangani}}{\text{Total Luas Permukiman Kumuh}} \times 100$$

$$\text{Persentase Penataan Kawasan Kumuh} = \frac{1,390 \text{ Ha}}{315,890 \text{ Ha}} \times 100 = 0,44$$

Berdasarkan Tabel diatas indikator Persentase Penataan Kawasan Kumuh dengan target 2024 sebesar 8,71%, namun realisasi yang dicapai baru mencapai 0,44%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program penataan kawasan kumuh masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari capaian 2024 sebesar 5,05%, ini berarti tingkat pencapaian terhadap target masih relatif rendah meskipun sudah banyak upaya dan progres pencapaian target yang telah dilakukan.

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Persentase Penataan Kawasan Kumuh	Persen	0,25	0,44	2,85	5,05

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel diatas indikator Persentase Penataan Kawasan Kumuh menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2023 ke 2024. Realisasi tahun 2023 sebesar 0,25%, sementara realisasi tahun 2024 meningkat menjadi 0,44%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dalam upaya penataan kawasan kumuh, meskipun masih dalam angka yang relatif kecil. Capaian tahun 2023 tercatat 2,85%, sedangkan capaian tahun 2024 meningkat menjadi 5,05%. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya progres yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun realisasi penataan kawasan kumuh masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Persentase Penataan Kawasan Kumuh adalah indikator baru di awal pelaksanaan Renstra 2023 – 2026 yang merupakan salah variabel pembentuk Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga realisasi dan capaian baru diukur sejak tahun 2023, sehingga capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel: 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi s/d 2024	Capaian
Persentase Penataan Kawasan Kumuh	Persen	8,79	0,44	5,00

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel diatas indikator Persentase Penataan Kawasan Kumuh memiliki target akhir renstra 2026 sebesar 8,79%, namun

hingga tahun 2024, realisasi yang dicapai baru mencapai 0,44%. Jika dilihat dari capaian sebesar 5,00%, ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah terjadi, realisasi kinerja penataan kawasan kumuh masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Tahun 2023-2026, Gap antara target akhir renstra 2026 dan realisasi s/d 2024 adalah 8,35%, Selisih yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih jauh dari target yang direncanakan.

Dari data luas awal kawasan kumuh yang tertuang pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/181/PERKIM.III/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yaitu seluas 4696,73 Ha dan dilakukan deliniasi kawasan di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama, sehingga luas kumuh hasil deliniasi tahun 2022 menjadi 315,271 Ha. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/19/PERKIM.III/2024 tanggal 07 Februari 2024 luas kawasan kumuh sebesar 315,890 Ha. Pada tahun 2024 ini tidak dilakukan identifikasi deliniasi kawasan kumuh seperti yang dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pengurangan luasan wilayah kumuh hanya teridentifikasi dari hasil pelaksanaan kegiatan fisik pada daerah kumuh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Tabel 3.10 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/19/PERKIM.III/2024

NO	NAMA LOKASI	LUASAN (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KOORDINAT		KEKUMUHAN	
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/DISTRIK	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.
1	Kawasan Mendawai	19,26	RT. 01 Sampai dengan RT. 11b	Mendawai	Arut Selatan	2°40'40" S	111°37'10" E	43	Sedang
2	Kawasan Mendawai Seberang	21,00	RT. 01 Sampai dengan RT. 5	Mendawai Seberang	Arut Selatan	2°40'30" S	111°37'10" E	39	Sedang
3	Kawasan Raja	13,80	RT. 01 Sampai dengan RT. 06	Raja	Arut Selatan	2°40'20" S	111°37'40" E	32	Ringan

4	Kawasan Raja Seberang	32,53	RT. 01 Sampai dengan RT. 06	Raja Seberang	Arut Selatan	2°40'10" S	111°38'20" E	44	Sedang
5	Kawasan Baru	36,77	RT. 01, 05 06, 07, 16, dan 18	Baru	Arut Selatan	2°40'10" S	111°38'30" E	27	Ringan
6	Kawasan Pasir Panjang	3,94	RT. 01, 02, 04 dan 11	Pasir Panjang	Arut Selatan	2°72'85" S	111°65'68" E	29	Ringan
7	Kawasan Kumai Hilir	56,16	RT. 01, sampai dengan 16	Kumai Hilir	Kumai	2°44'40" S	111°43'20" E	27	Ringan
8	Kawasan Kumai Hulu	86,08	RT. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17	Kumai Hulu	Kumai	2°43'50" S	111°43'50" E	26	Ringan
9	Kawasan Candi	1,77	RT. 01, 02, dan 09	Candi	Kumai	2°44'15" S	111°43'30" E	31	Ringan
10	Kawasan Lada Mandala Jaya	1,70	RT. 04, 07, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, dan 23	Lada Mandala Jaya	Pangkalan Lada	2°31'30" S	111°44'20" E	47	Sedang
11	Kawasan Markati Jaya	2,51	RT. 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 15, 16, dan 19	Markati Jaya	Pangkalan Lada	2°27'15" S	111°44'20" E	39	Sedang
12	Kawasan Sungai Melawen	1,51	RT. 10, 11, 12, 13, dan 14	Sungai Melawen	Pangkalan Lada	2°27'20" S	111°44'0" E	40	Sedang
13	Kawasan Sungai Rangit Jaya	1,25	RT. 06, 07, 09, 12, dan 15	Sungai Rangit Jaya	Pangkalan Lada	2°33'15" S	111°43'15" E	47	Sedang
14	Kawasan Arga Mulya	0,86	RT. 04 dan 05	Arga Mulya	Pangkalan Banteng	2°23'15" S	111°35'15" E	41	Sedang
15	Kawasan Sungai Pulau	0,29	RT. 01 dan 06	Sungai Pulau	Pangkalan Banteng	2°36'20" S	111°31'20" E	43	Sedang
16	Kawasan Pangkalan Banteng	0,41	RT. 01, 02, 03, dan 04	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	2°29'30" S	111°33'20" E	38	Sedang
17	Kawasan Sungai Bengkuang	2,16	RT. 01 sampai dengan 08	Sungai Bengkuang	Pangkalan Banteng	2°24'30" S	111°32'20" E	39	Sedang
18	Kawasan Kotawaringin Hilir	7,12	RT. 01, 04a dan 03a	Kotawaringin Hilir	Kotawaringin Lama	2°48'74" S	111°44'08" E	42	Sedang
19	Kawasan Kotawaringin Hulu	6,17	RT. 03 dan 04	Kotawaringin Hulu	Kotawaringin Lama	2°48'33" S	111°44'56" E	37	Ringan
20	Kawasan Pangkut	21,58	RT. 01 sampai dengan 05	Pangkut	Arut Utara	2°11'30" S	111°55'0" E	39	Sedang
Total		315,890							

Sumber: Data diolah

Berdasarkan identifikasi dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan wilayah kumuh yang dilakukan, diperoleh data pengurang luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 1,390 Ha, sehingga total luas kawasan

permukiman kumuh sampai dengan tahun 2024 tersisa 314,500 Ha dari Luasan Awal, adapun wilayah yang tertangani pada tahun 2024 berada di Kecamatan Arut Selatan yaitu, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Raja Seberang, Kelurahan Baru, dan Desa Pasir Panjang, Kecamatan Kumai dilaksanakan di Kelurahan Kumai Hilir dan Kumai Hulu, di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan Kotawaringin Hulu, serta di Kecamatan Arut Utara yaitu di Kelurahan Pangkut.

Tabel 3.11 Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2024

NO	URAIAN PEKERJAAN	Kawasan	Jenis Konstruksi	Penanganan			
				Panjang	Lebar	Luas	Hektar
1	Penigkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Gg. Kopar 2 RT. 18 Kel. Baru Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton + Latasir	59,30	4,50	266,85	0,03
2	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Gg. Kopar 3 Rt. 18 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton + Latasir	77,00	3,80	292,60	0,03
3	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Gg. Tempala Rt. 18 Kel. Baru Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton + Latasir	86,50	4,00	346,00	0,03
4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Gg. Tempala Rt. 18 Kel. Baru Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton + Latasir	83,00	4,00	332,00	0,03
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Jl. Babaga 2, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton + Latasir	105,00	2,00	210,00	0,02
6	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Jl. Ahmad Yani KM 6 Gg. Wasdamah RT. 31/RW. 10 Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan	Baru	(LPB)/Telford	63,60	3,50	222,60	0,02
7	Penigkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Jalan Matnoor Gg. Barakas Kel. Baru Kec. Arut Selatan	Baru	LPA + Latasir	98,00	4,50	441,00	0,04
8	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman (Titian Kayu Ulin) di Rt. 18 Kel. Baru Kec. Arut Selatan	Baru	Titian	48,00	2,00	96,00	0,01
9	Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman di Gg. Arwana III RT. 13, Kelurahan Baru, Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton	39,20	1,00	39,20	0,00

10	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Gg. Arwana III RT. 13, Kelurahan Baru, Kec. Arut Selatan	Baru	Cor Beton	22,00	3,00	66,00	0,01
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Rt. 13 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	(LPB)/Telford	59,80	4,00	239,20	0,02
12	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Rt. 28 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	Cor Beton	63,50	3,00	190,50	0,02
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Jalan Tranlik Gg. Flamboyan Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	(LPB)/Telford	92,50	4,00	370,00	0,04
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman RT.2 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	114,80	3,00	344,40	0,03
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di RT. 12 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	Latasir	61,80	4,00	247,20	0,02
16	Lanjutan Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman di Rt. 8 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	Cor Beton	110,00	1,50	165,00	0,02
17	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Rt. 12 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	Latasir	66,00	3,50	231,00	0,02
18	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di RT. 15 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Pasir Panjang	(LPB)/Telford	105,15	3,50	368,03	0,04
19	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Darussalam II RT 11 Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai	Kumai Hilir	Cor Beton + Latasir	121,00	2,80	338,80	0,03
20	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Jl. Pinang Merah RT.3 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai	Kumai Hilir	Cor Beton + Latasir	124,00	2,00	248,00	0,02
21	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Gg. Berlian RT 16 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai	Kumai Hilir	Cor Beton + Latasir	121,00	2,00	242,00	0,02
22	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Gg. H. Ijay RT 15 Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai	Kumai Hilir	Cor Beton + Latasir	82,00	2,80	229,60	0,02
23	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Rt. 03	Kumai Hilir	Cor Beton + Latasir	87,00	2,30	200,10	0,02

	Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai						
24	Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Jalan Sehati RT. 13 Kumai Hulu, Kec. Kumai	Kumai Hulu	Cor Beton	123,50	0,40	49,40	0,00
25	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman di RT 14 RW 06 Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada	Lada Manda Jaya	Cor Beton	75,80	0,80	60,64	0,01
26	Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman di Jl. Kutilang II, Desa Lada Mandala Jaya, Kec. Pangkalan Lada	Lada Manda Jaya	Cor Beton	155,00	0,60	93,00	0,01
27	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Jl. Jalak I RT 20 Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada	Lada Manda Jaya	Cor Beton + Latakir	66,90	3,50	234,15	0,02
28	Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman di Gg. Manggis RT. 11, Kelurahan Raja, Kec. Arut Selatan	Raja	Cor Beton	58,00	0,40	23,20	0,00
29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Gg. Manggis RT. 11, Kelurahan Raja, Kec. Arut Selatan	Raja	Latakir	147,00	2,00	294,00	0,03
30	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Kelurahan Raja Kec. Arut Selatan	Raja	Titian	106,00	3,00	318,00	0,03
31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di RT.3 Kel. Raja Seberang Kec. Arut Selatan	Raja Seberang	Cor Beton + Latakir	134,00	2,00	268,00	0,03
32	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Jl. Gusti Abdullah Kel. Raja Seberang, Kec. Arut Selatan	Raja Seberang	Cor Beton + Latakir	181,00	2,00	362,00	0,04
33	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman (Timbunan) Jl. Kobar Mandiri Rt. 07 Kel. Raja Seberang	Raja Seberang	Timbunan	260,00	4,00	1.040,00	0,10
34	Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman/TKU di Rt. 05 Kel. Raja Seberang	Raja Seberang	Titian Kayu Ulin	47,00	2,00	94,00	0,01
35	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Jalan Kobar Mandiri Rt. 7 Kel. Raja Seberang Kec. Arut Selatan	Raja Seberang	Timbunan	198,00	4,50	891,00	0,09
36	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman (Titian) di Jl. Syaperi Arsad RT.01 Kel. Mendawai Seberang Kec. Arut Selatan	Mendawai Seberang	Titian	62,00	1,90	117,80	0,01
37	Peningkatan Jalan Lingkungan	Mendawai Seberang	Cor Beton + Latakir	489,00	1,90	929,10	0,09

	Permukiman di Jl. Syaperi Arsad RT. 01, 02, 03, 04, 05 Kelurahan Mendawai Seberang, Kec. Arut Selatan						
38	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman di Jln Abdul Syukur RT 004 Kelurahan Mendawai Seberang, Kec. Arut Selatan	Mendawai Seberang	Cor Beton + Latasir	64,80	3,80	246,24	0,02
39	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Rt. 11 Depan Mushola Darul Iman Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Cor Beton + Latasir	114,00	3,00	342,00	0,03
40	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman RT.04 RT.02 Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Cor Beton + Latasir	66,00	3,00	198,00	0,02
41	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman RT.02 RW.01 Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Cor Beton + Latasir	66,33	3,00	198,99	0,02
42	Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Jalan Apel Desa Sungai Melawen Kec. Pangkalan Lada	Sungai Melawen	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	75,00	5,00	375,00	0,04
43	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jl. Belitung Laut (Timbunan) Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Timbunan Tanah Laterit	66,50	4,00	266,00	0,03
44	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jl. Belitung Laut (Siring) Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Beronjong	16,90	1,00	16,90	0,00
45	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman (Pembuatan badan jalan) Jl. Belitung Laut, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Pembuatan badan jalan + Timbunan Tanah Laterit	100,00	3,50	350,00	0,04
46	Peningkatan Jalan lingkungan Permukiman di Gg. Linang, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Cor Beton + Latasir	70,00	3,00	210,00	0,02
47	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Gg. Pesantren Kel. Kotawaringin Hilir Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	Cor Beton + Latasir	44,00	3,50	154,00	0,02
48	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jl. H. Badrun (Rehab) Kelurahan	Kotawaringin Hulu	LPA +Latasir	37,60	1,50	56,40	0,01

	Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama						
49	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jln. Ratu Radiah Kel. Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	LPA +Latasir	127,00	4,00	508,00	0,05
50	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman di Gg. Amanah Kel. Kotawaringin Hulu Kec. Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	Cor Beton + Latasir	61,00	4,00	244,00	0,02
51	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Jln. Kahayan RT. 05 Kelurahan Pangkut Kec. Aruta	Kelurahan Pangkut	(LPB)/Telford	66,40	3,50	232,40	0,02
TOTAL PENANGANAN SATUAN HEKTARE							1,390

Sumber: Data diolah

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut diatas, di dukung oleh 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Program Kawasan Permukiman Rp.12.387.719.891,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.378.392.331,- atau sebesar 99,92% dan Program Perumahan dan Permukiman Kawasan Kumuh dengan pagu anggaran Rp.299.450.200,00,- dan terealisasi sebesar Rp.294.760.200,00,- atau sebesar 98,43%. Adapun analisis program yang mendukung dan yang tidak efektif dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di dalam kawasaan kumuh, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, yaitu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, dan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu pelaksanaan penyediaan dan peningkatan jalan lingkungan dan drainase pada kawasan

kumuh di 51 lokasi. Program ini idealnya sangat mendukung dalam upaya pencapaian target, namun dikarenakan Luas kawasan kumuh jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia masih belum berimbang, sehingga program ini **belum Efektif** dalam mendukung pencapaian target indikator pada tahun 2024.

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, pada tahun 2024 kegiatan telah dilaksanakan penyaluran Bantuan Rehabilitasi RTLH di luar kawasan kumuh sebanyak 12 Unit, dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru. Program ini juga **belum Efektif** mendukung capaian target indikator dikarenakan anggaran yang tersedia masih terbatas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan upaya dalam mengurangi kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah dan telah di sahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 10 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
2. Mengambil kebijakan strategis Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/19/PERKIM.III/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat,

3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat terkait lingkungan sehat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, selain itu juga telah dilaksanakan sosialisasi dengan pengembang perumahan terkait penanganan PSU maupun aset PSU Perumahan.
4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait, diantaranya adalah dukungan Baznas Kabupaten Kotawaringin Barat yang memberikan bantuan biaya rehabilitasi rumah/peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni
5. Melaksanakan peningkatan kualitas jalan dan drainase lingkungan pada wilayah permukiman kumuh melalui kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang dilaksanakan oleh dinas terkait lainnya
6. Melaksanakan penyusunan data base DED kawasan kumuh sebagai persyaratan dasar pengusulan kegiatan penanganan kawasan kumuh di tahun $n+1$

Adapun analisis penyebab tidak tercapainya kinerja pada Persentase Penataan Kawasan Kumuh adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya peran tokoh masyarakat, kepala desa dan aparatur desa serta pihak swasta dalam memfasilitasi kegiatan sehingga menghidupkan semangat gotong royong dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh.
2. Belum maksimalnya partisipasi pihak swasta BUMN, BUMD dalam penyelesaian permasalahan kawasan kumuh,
3. Belum maksimalnya peran Kelompok Kerja Penataan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh.
4. Belum dilakukan kembali identifikasi dan deliniasi kawasan kumuh secara menyeluruh di 6 kecamatan.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi deliniasi kawasan kumuh

2. Memperkuat koordinasi Pokja dalam rangka dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh
3. Mengajukan usulan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat terkait penanganan dan pencegahan kawasan kumuh
4. Meningkatkan kerjasama dalam rangka penanganan kawasan kumuh dengan pihak swasta/BUMN dan BUMD

❖ **Sasaran 2 (dua) : Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten**

Keberhasilan sasaran 2 (dua) diukur dengan 1 (satu indikator) yaitu persentase pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya dengan target pada tahun 2024 ini sebesar 100, dan terealisasi 100, sehingga capaian sebesar 100% atau dengan kriteria “**sangat tinggi**” adapun Persentase pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya diperoleh dengan perhitungan (Luas Lahan yang diajukan rekomendasi mendapat ijin lokasi/luas lahan yang direkomendasikan mendapat ijin lokasi) x 100.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target indikator persentase pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel : 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	Persen	100	100	100

Sumber: Data diolah

Formulasi Perhitungan:

Persentase pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya =

$$\frac{\text{Luas lahan yang diajukan rekomendasi}}{\text{Luas Lahan yang direkomendasikan mendapat ijin}} \times 100$$

Persentase pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya =

$$\frac{351.647,47 \text{ m}^2}{351.647,47 \text{ m}^2} \times 100 = 100$$

Pada Tahun 2024 pengajuan untuk rekomendasi site plan penggunaan lahan untuk perumahan dan permukiman yang diusulkan seluas

351.647,47 M² dengan luasan yang disetujui seluas 351.647,47 M² untuk kawasan perumahan termasuk fasilitas umum dan kelengkapan PSU, dengan usulan sebanyak 29 lokasi, dan dapat diterbitkan rekomendasi sebanyak 29 lokasi dengan total tapak yang di setujui sebanyak 1.615 tapak/unit.

Tabel : 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	Persen	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 3.11, indikator Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukannya menunjukkan hasil yang sangat stabil, dengan realisasi dan capaian sebesar 100% baik pada tahun 2023 maupun 2024. Indikator Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya adalah indikator baru yang diukur mulai pada tahun 2023 sehingga tidak dapat di tampilkan data pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel : 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja Jangka Menengah Renstra 2023-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	Persen	100	100	100

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas maka target jangka menengah pada akhir Renstra Tahun 2023-2026 pada indikator kinerja Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya telah mencapai target.

Adapun hambatan yang dihadapi selama penyusunan untuk tercapainya kinerja pada Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya antara lain:

1. Lambatnya realisasi kegiatan menunggu pengajuan dari pihak pengembang perumahan dan pihak yang melakukan kavling tanah.
2. Saat pengajuan siteplan dari pihak pengembang/ developer, pengajuan luasan PSU tidak sesuai dengan perhitungan 30% dari luas lahan yang diajukan sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang.
3. Developer sudah mulai membangun perumahan pada saat mengajukan siteplan, sehingga harus melakukan perubahan ukuran tapak baru sehingga saat pengecekan di lapangan harus melakukan pengukuran ulang pada GSB untuk memastikan ukuran di lapangan sesuai dengan pengajuan atau tidak.

Strategi yang dilakukan tercapainya pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi terkait siteplan kepada pengembang perumahan.
2. Melaksanakan Pendataan Ganti Kerugian tanah masyarakat untuk pembangunan Fasilitas Umum, yang prioritaskan untuk

kegiatan Reforma Agraria dan akan dilaksanakan pada tahun 2025

Faktor pendukung tercapainya pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya adalah:

1. Adanya Kerjasama dengan OPD lainnya yaitu Sekretariat Daerah, PUPR, Dinas Pertanian, DPMPTSP, dan ATR BPN
2. Adanya sosialisasi kepada Desa dan Kelurahan terkait program pertanahan di kabupaten Kotawaringin Barat
3. Terlaksananya penyusunan Database terkait informasi Tanah antara lain penguasaan tanah dan sengketa tanah.
4. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan terkait pemantaan tanah yang sesuai dengan peruntukkannya.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025:

1. Pengusulan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kawasan Permukiman dan Lahan Garapan sesuai Peta Indikatif HPK-TP (Hutan Produksi yang dapat di Konversi-Tidak Produktif).
2. Memaksimalkan Peran Kerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria
3. Pendataan Aset Tanah dibawah Jalan pada kawasan Perumahan dan Permukiman



Gambar : 3.2 Pelaksanaan kegiatan Verifikasi Pengajuan Rekomendasi Siteplan 2024

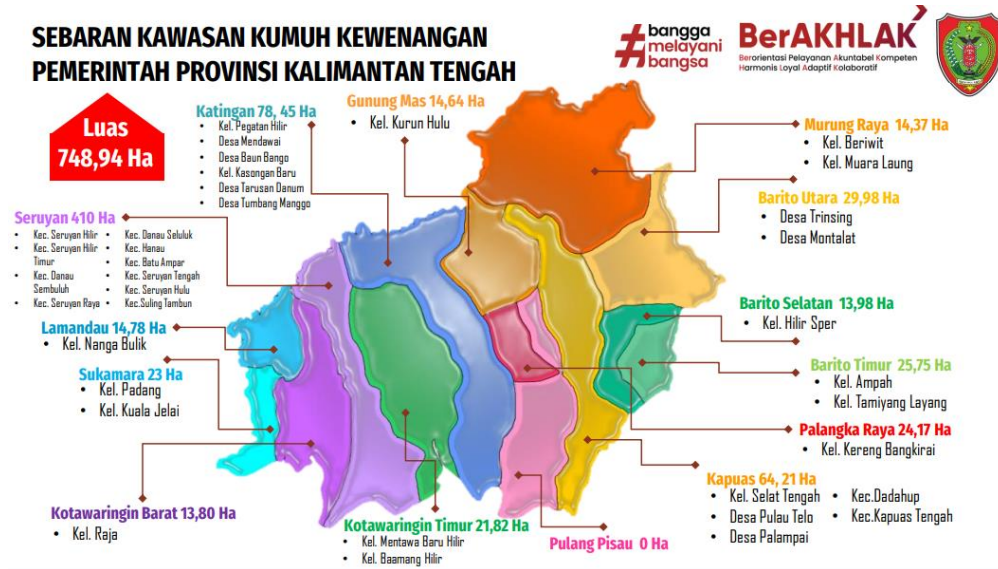
Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut diatas, di dukung oleh 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp56.344.950,-,

Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp.203.224.650,-, Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp.60.589.900,- dan Program Penatagunaan Tanah dengan anggaran sebesar Rp.344.496.790,- dengan penjelasan sebagai berikut :

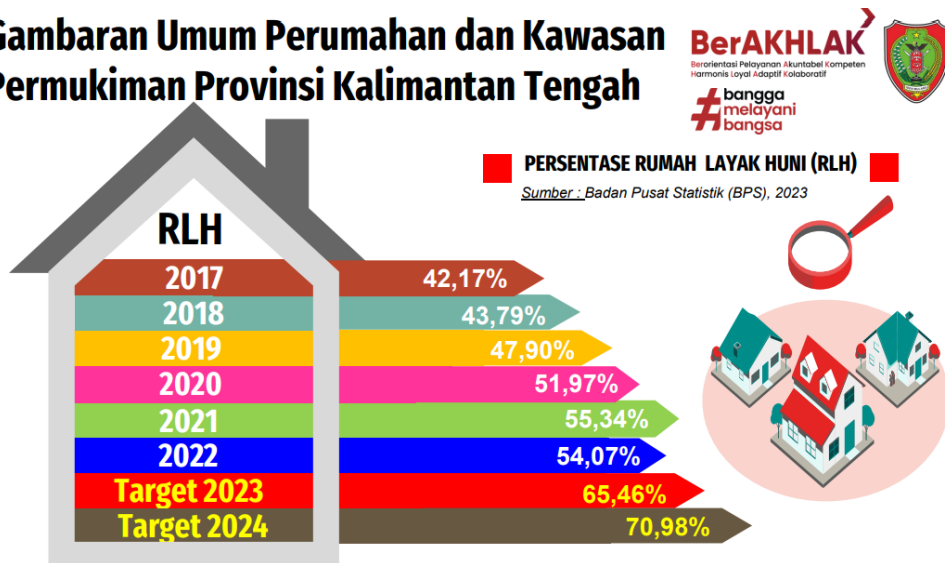
1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yakni Melaksanakan koordinasi, inventarisasi dan pengelolaan data penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
2. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pelaksanaannya diantaranya Penyelesaian Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria
3. Program Penatagunaan Tanah dengan Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah Pembuatan Sertifikat Tanah di Bawah Jalan, Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng, dan pelaksanaan Identifikasi Lokasi Pengesahan Rencana Tapak Penggunaan Tanah untuk Rencana Tata Ruang SITEPLAN

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi

Gambar 3.3 Baseline dan target nasional rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh



Gambaran Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah



Dari gambar diatas dapat dilihat beberapa indikator kinerja dan capaian kinerja yang dapat di sandingkan dengan target/standar provinsi adalah Capaian Target Cakupan Rumah Layak Huni dan Target Luas penanganan kumuh pemerintah bahwa target dinas atau target daerah jika di bandingkan dengan standar Provinsi. Target Provinsi untuk rumah layak huni tahun 2024 sebesar 70,98 % sedangkan target dinas sebesar 97,94% dengan realisasi capaian 97,92% yang berarti bahwa target dan capaian

terkait rumah layak huni masih lebih tinggi dari capaian provinsi. Sedangkan luasan penangan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 13,8 Ha dari seluruh luas Kawasan Kumuh Kotawaringin Barat sebesar 314,500 Ha setelah penanganan pada tahun 2024.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

Dalam upaya mencapai target kinerja dan capaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan efisiensi pada salah satu indikator sebagaimana tersaji pada tabel:

Tabel 3.13 Efisiensi sumber daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisien si %
		Target	Realisa si	% Capai an	Target	Realisasi	% Capai an	
					(Rp)	(Rp)		
Meningkat nya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaata n tanah yang sesuai dengan peruntukan nya	100,00 %	100,00 %	100,00 %	608.311.3 40	514.683.2 56	84,61	15,39
Total efisiensi anggaran								15,39

Sumber: Data diolah

Selain dari sisi anggaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektor. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.14 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	PUPR	Pembangunan dan Perluasan Sarana Prasarana Air Bersih dan pengolahan Limbah.	Bangunan SPAM, Bangunan Jamban dan Pengelolaan Limbah	Mendukung pencapaian target kinerja Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Dishub	Pengelolaan PJU	PJU	
		DLH	Pengelolaan Sampah dan lingkungan	Truk sampah, Tempat sampah.	

Sumber: Data diolah

3.5 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 26.261.271.000,00 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp.33.192.476.000,- Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp.32.003.918.334,- atau sebesar 96,42%. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel: 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
A	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Pegawai	3.411.512.938,00	3.327.163.217,00	97,53
2	Belanja Barang dan Jasa	3.267.923.856,00	2.551.769.743,00	78,09
3	Belanja Hibah	-	-	-
4	Belanja Bantuan Sosial	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	100
	Jumlah Belanja Operasi	7.571.499.671,00	7.339.300.437,68	96,93
B	BELANJA MODAL			
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.611.874,00	125.611.874,00	100
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.495.423.356,00	1.445.068.050,00	96,63

No.	Uraian	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.834.940.687,00	22.517.349.750,00	98,61
4	Belanja Modal Aset Lainnya	697.063.289,00	676.955.700,00	97,12
	Jumlah Belanja Modal	25.153.039.206,00	24.764.985.374,00	98,46
	JUMLAH BELANJA	33.192.476.000,00	32.003.918.334,00	96,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.16 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran setelah ABT (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.729.576.640	4.581.394.193	96,64
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.745.250	32.254.250	92,83
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.626.245.938	3.534.114.273	97,46
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	44.630.000	44.185.181	99,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.084.000	175.729.024	84,05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	308.339.018	304.128.846	98,63
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.560.674	249.353.874	99,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218.855.460	203.711.745	93,08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.116.300	37.917.000	99,48
2	Program Pengembangan Perumahan	499.805.778	42.043.851	8,41
	Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	38.524.050	25.699.001	66,71

No	Program/ Kegiatan	Anggaran setelah ABT (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	16.912.900	-	0,00
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	438.300.828	15.134.850	3,45
	Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	2.820.000	1.210.000	42,91
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3.248.000	-	0,00
3	Program Kawasan Permukiman	12.387.719.891	12.331.997.831	99,55
	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	600.398.349	596.402.050	99,33
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.787.321.542	11.735.595.781	99,56
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	299.450.200	294.760.200	98,43
	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota	299.450.200	294.760.200	98,43
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	14.667.612.151	14.239.039.003	97,08
	Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	14.667.612.151	14.239.039.003	97,08
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	203.224.650	193.984.050	95,45
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	203.224.650	193.984.050	95,45
8	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	60.589.900	52.150.171	86,07
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	60.589.900	52.150.171	86,07

No	Program/ Kegiatan	Anggaran setelah ABT (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
9	Program Penatagunaan Tanah	344.496.790	268.549.035	77,95
	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	344.496.790	268.549.035	77,95
	JUMLAH	33.192.476.000	32.003.918.334	96,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2024 adalah sebesar 96,42% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Tinggi**”

BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimana target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 68,88 dan realisasi sebesar 66,12 dengan capaian 95,99%, meskipun ada salah satu indikator yang kinerjanya sangat rendah, namun secara akumulatif kriteria kinerja adalah **“sangat tinggi”**.
2. Capaian kinerja keuangan 97,91% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.003.918.334,- sehingga masuk dalam peringkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komitmen, koordinasi dan sinergisitas terpadu terhadap semua instansi dalam mensukseskan program penuntasan/penanganan kawasan kumuh, dimana program kegiatan SKPD pengampu tujuh aspek penentu kawasan kumuh belum memiliki rencana kerja dan lokus yang sama.
- 2) Belum tersedianya database terkait kawasan kumuh dan rencana aksinya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Komitmen dan koordinasi terpadu, dimana semua instansi terkait harus fokus dan memiliki rencana kerja yang sama dalam rangka mensukseskan program penuntasan/penanganan kawasan kumuh.

- 2) Melaksanakan penyusunan kajian-kajian dan penyusunan database penanganan permukiman kumuh secara integrative sebagai acuan rencana aksi dan pemenuhan persyaratan dokumen untuk dana APBN.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman dan peningkatan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan dalam rangka penanganan kawasan kumuh.
- 4) Peningkatan sosialisasi program penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai upaya membangun partisipasi dan usaha mandiri/swadaya masyarakat.
- 5) Penuntasan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) melalui dana APBD, APBN, DAK, CSR dengan Perusahaan swasta dan badan usaha milik Negara (BUMN dan BUMD) serta BAZNAS

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 19651225 199303 1 009

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 800/270/PERKIM.I/2023

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR
800/011.A/PERKIM.1/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2023 - 2026**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 800/011.A/Perkim.1/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2006 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
 9. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 92);
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 800/011.A/Perkim.1/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah pada Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
- KETIGA** : Surat Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Desember 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651225 199303 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 800/ 270 /PERKIM.1/2023
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 800/011.A/PERKIM.1/2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 - 2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target			
			2023	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	68,74%	68,88%	69,00%	69,17%
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,55%	97,94%	98,25%	98,71%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,67%	8,71%	8,75%	8,79%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100%	100%	100%	100%

Tabel Definisi Operasional dan Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	Variabel Pembentuk Indikator	Formulasi	Satuan	Definisi Operasional
Indikator Kinerja Utama				
Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan	Persentase Rumah Layak Huni	Index Infrastruktur PRKP = $\frac{(a+b+c)}{3}$	Skor Index	Perhitungan index diperoleh dari: a. Persentase Rumah Layak Huni b. Persentase Penataan Kawasan Kumuh c. Persentase Pemanfaatan Lahan sesuai Peruntukannya
	Persentase Penataan Kawasan Kumuh			
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya			

Indikator	Variabel Pembentuk Indikator	Formulasi	Satuan	Definisi Operasional
Indikator Sasaran				
Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	$= \text{Jumlah Rumah layak huni} / \text{Jumlah Rumah} \times 100$	%	Jumlah Rumah Layak Huni yang tersedia dibanding jumlah rumah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat
	Jumlah Rumah			
Persentase Penataan Kawasan Kumuh	Total Luas Permukiman Permukiman Kumuh yang tertangani	$= \text{Total luas permukiman kumuh yang tertangani} / \text{luas kawasan kumuh} \times 100$	%	Luas Kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Kotawaringin Barat
	Luas Kawasan Kumuh			
Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	Luas Lahan yang diajukan rekomendasi mendapat ijin lokasi	$= \text{Luas lahan yang diajukan rekomendasi mendapat ijin lokasi} / \text{Luas Lahan yang direkomendasikan mendapat ijin lokasi} \times 100$	%	Luas Lahan yang direkomendasikan mendapat ijin lokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Drs. EDY RAHMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651225 199303 1 009



Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
T1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta pertanian	Indeks Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanian	68,88
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,94
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100,00

Kepala Dinas,



Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512251993031009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EDY RAHMAN
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi,. M. Si
Jabatan : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Penjabat Bupati
Kotawaringin Barat

Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi,. M. Si

Pihak Pertama
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Kepala Dinas

Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651225 199303 1 009

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	98,25%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,75%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100%
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	100%

PEJABAT BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi, M.Si

Pangkalan Bun, Januari 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN BERMUKIMAN
KEPALA DINAS

Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	98,25%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,75%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100%
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 5.512.412.850	APBD Murni 2025
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 580.779.050	APBD Murni 2025
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 20.540.929.740	APBD Murni 2025
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 1.300.000.000	APBD Murni 2025
5	Program Peningkatan Fasilitas, Sarana, dan Fasilitas Umum	Rp 43.770.424.210	APBD Murni 2025
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 52.634.000	APBD Murni 2025
7	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp 467.484.100	APBD Murni 2025
8	Program Penatagunaan Tanah	Rp 417.436.050	APBD Murni 2025
Total		Rp 72.642.100.000	

**PEJABAT BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT**



Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi, M.Si

Pangkalan Bun, Januari 2025
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMUEL, SST., MT

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDY RAHMAN

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Drs. EDY RAHMAN

NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama

Sekretaris

SAMUEL, SST., MT

NIP.19700710 199803 1008

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 89.887.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.747.619.233,91
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 155.198.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 82.792.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 202.235.516
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 106.970.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 69.747.600
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 57.963.000
Total		Rp 5.512.412.849,91

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN


Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN


SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99%

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDY RAHMAN

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perumahan Rakyat

LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si
NIP. 19700910 199603 1 005

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana atau relokasi program	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 524.079.550
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rp 56.699.500
3	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 43.770.424.210,09
Total		Rp 44.351.203.260,09

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT



LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si
NIP.19700910 199603 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana atau relokasi program	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	100%

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT



LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.SI
NIP.19700910 199603 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKARDI, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDY RAHMAN

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Drs. EDY RAHMAN

NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengembangan
Kawasan Permukiman

SUKARDI, S.Pd

NIP. 19810111 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	1,65%
2	Terlaksananya Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertangani	28,55%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Rp 234.940.050
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Rp 20.305.989.690
3	Pencogahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 1.300.000.000
Total		Rp 21.840.929.740

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN


Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN


SUKARDI, S.Pd
NIP. 19810111 200501 1 009

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	1,65%
2	Terlaksananya Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertangani	28,55%

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN



SUKARDI, S.Pd
NIP. 19810111 200501 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : dlsperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPIUDIN, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDY RAHMAN
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Drs. EDY RAHMAN

NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pertanahan

SAPIUDIN, S.Hut

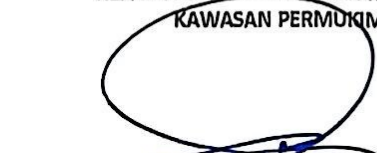
NIP. 19740806 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sengketa yang di tangani	100%
2	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%
3	Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%
4	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bidang tanah pemda yang di daftarkan sertifikasi	43,16%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 52.634.000
2	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 401.309.250
3	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.174.850
4	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 417.436.050
Total		Rp 937.554.150

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN


Drs. BBT RAHMAT
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sengketa yang di tangani	100%
2	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	70%
3	Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tindak lanjut Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%
4	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bidang tanah pemda yang di daftarkan sertifikasi	43,16%

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA BIDANG PERTANAHAN



SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDIATMOKO TRI RAHARJO, ST
Jabatan : Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LETUS KILAT MANTIKEL, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perumahan Rakyat

LETUS KILAT MANTIKEL, SH., M.Si
NIP. 19700910 199603 1 005

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perumahan

WIDIATMOKO TRI RAHARJO, ST
NIP. 19691222 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
2	Terlaksananya Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	150 Orang
3	Terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen
4	Tercapainya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	212 Lokasi

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 524.079.550
2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	Rp 56.699.500
3	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 120.739.950
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 43.585.586.360,09
Jumlah		Rp 44.287.105.360,09

KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT


LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si
NIP.19700910 199603 1 005

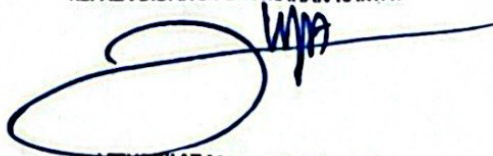
Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MUDA


WIDIATMOKO TRI RAHARJO, ST
NIP. 19691222 200604 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
2	Terlaksananya Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	150 Orang
3	Terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen
4	Tercapainya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	212 Lokasi

KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT



LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.SI
NIP.19700910 199603 1 005

Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MUDA



WIDIATMOKO TRI RAHARJO, ST
NIP. 19691222 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APRID, ST., MT
Jabatan : Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perumahan Rakyat

LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si
NIP. 19700910 199603 1 005

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perumahan

APRID, ST., MT
NIP. 19700414 199503 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	7 Laporan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT



LETUS KILAT MANTIKEL, SH., M.SI
NIP.19700910 199603 1 005

Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MUDA



APRID, ST., MT
NIP. 19700414 199503 1 004

PERUBAHAN ENERGI (PE) TAHUN 2021
PERUBAHAN ENERGI DARI PERUBAHAN ENERGI DAN ENERGI PERUBAHAN
(Sedikit dan W. dan Sedikit dan W.)

No	Daftar Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Indikator Kinerja dan Kegiatan PE/Perubahan dan Kegiatan	Indikator / target dan target (Indikator PE/Perubahan yang terdistribusi dan Kegiatan)	Target

No	dan Kegiatan	Kegiatan
1	Verifikasi dan Perubahan PE/Perubahan dan Kegiatan	1/1 1/1 1/1 1/1
	Indikator	1/1 1/1 1/1 1/1

REKOR ENERGI PERUBAHAN ENERGI



REKOR ENERGI PERUBAHAN ENERGI, W. dan
dan PERUBAHAN ENERGI 1/1

Perubahan dan, W. dan W. dan
REKOR ENERGI PERUBAHAN ENERGI DAN ENERGI
PERUBAHAN ENERGI W. dan



REKOR ENERGI, W. dan
dan PERUBAHAN ENERGI 1/1



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAID ABDURRAHMAN, A.Md

Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAPIUDIN, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pertanahan


SAPIUDIN, S.Hut

NIP. 19740806 199403 1 004

Pihak Pertama

Penata Ruang Ahli Muda



SAID ABDURRAHMAN, A.Md


NIP. 19691128 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 142.906.400
2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 66.174.850
Total		Rp 209.081.250

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004


Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA RUANG AHLI MUDA


SAID ABDURRAHMAN, A.Md
NIP. 19691128 199403 1 004


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	3 Dokumen
2	Terlaksananya Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA RUANG AHLI MUDA


SAID ABDURRAHMAN, A.Md
NIP. 19691128 199403 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIYADI, SE
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAPIUDIN, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pertanahan

Pihak Pertama
Penata Ruang Ahli Muda


SAPIUDIN, S.Hut

NIP. 19740806 199403 1 004



SUPRIYADI, SE

NIP. 19730227 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang di tindak lanjuti	5 Lokasi
2	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 52.634.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 10.097.600
3	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 248.305.250
	Total	Rp 311.036.850

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA RUANG AHLI MUDA


SUPRIYADI, SE
NIP. 19730227 199303 1 004


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Es. IV ke Pejabat Es. III)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang di tisdik lanjut	5 Laku
2	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Pendaftaran Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelakutan Maksimum dan Tanah Absenut dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Pendaftaran Subjek dan Objek Pendaftaran Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelakutan Maksimum dan Tanah Absenut dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	2 Dokumen

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


S. APIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA RUANG AHLI MUDA


SUPRIYADI, SE
NIP. 19730227 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL KADIR, S.IP
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAPIUDIN, S.Hut
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pertanahan



SAPIUDIN, S.Hut

NIP. 19740806 199403 1 004

Pihak Pertama
Penata Ruang Ahli Muda



ABDUL KADIR, S.IP


NIP. 19711208 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah bidang tanah pemda yang di daftarkan sertifikasi	280 Dokumen

	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan	Rp 200.900.050
2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan	Rp 216.536.000
	Total	Rp 417.436.050

KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

Pangkalan Bun, Januari 2025
PENATA RUANG AHLI MUDA


ABDUL KADIR, S.IP
NIP. 19711208 199603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD MALIK, S.IP

Jabatan : Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAMUEL, SST., MT

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris

SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

Pihak Pertama
Kepala Subbag Penyusunan
Program, Anggaran dan
Akuntansi

MUHAMAD MALIK, S.IP
NIP. 19840825 200501 1 002

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 68.871.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 4.500.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 3.855.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.525.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.410.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.226.500
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.612.797.283,91
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 129.022.300
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.300.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 3.499.650
Total		Rp 4.837.506.734

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA SUBBAG TATA USAHA



MUHAMMAD MALIK, S.IP
NIP. 19840825 200501 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA SUBBAG TATA USAHA



MUHAMAD MALIK, S.IP
NIP. 19840825 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLICH, S.AP
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAMUEL, SST., MT
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris

SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

Pihak Pertama
Kepala Subbag Tata Usaha

MUSLICH, S.AP
NIP. 19681009 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	8 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang disediakan	2 Dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 Dokumen
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen
5	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Dokumen
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 155.198.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 13.320.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Rp 69.472.000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 17.225.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 66.901.809
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 11.864.457
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 16.525.250
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 89.719.000
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 106.970.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp 69.747.600
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 36.083.000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 21.880.000
Total		Rp 674.906.116

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA SUBBAG TATA USAHA

MUSLICH, S.AP
NIP.19681009 199503 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. IV ke Pejabat Ess. III)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	8 Dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang disediakan	2 Dokumen
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	5 Dokumen
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Dokumen
5	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Dokumen
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Dokumen

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN


SAMUEL S.T., MT
NIP.19700710 199803 1008

Pangkalan Bun, Januari 2025
KEPALA SUBBAG TATA USAHA


MUSLICH, S.AP
NIP.19681009 199503 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EDY RAHMAN
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi,. M. Si
Jabatan : Penjabat Bupati Kotawaringin Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Penjabat Bupati
Kotawaringin Barat

Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi,. M. Si

Pihak Pertama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Kepala Dinas

Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651225 199303 1 009

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97.94%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100.00%
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	99.00%

Pangkalan Bun, Oktober 2024


Bupati Kotawaringin Barat



Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi, M. Si

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas



Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651225 199303 1 009

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97.94%
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	8,71%
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya	100.00%
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	99.00%

Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4,729,576,640.00
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 499,805,778.00
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 12,387,719,891.00
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 299,450,200.00
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 14,667,612,151.00
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 203,224,650.00
7	Program penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 60,589,900.00
8	Program Penatagunaan Tanah	Rp 344,496,790.00
Total		Rp 33,192,476,000

Bupati Kotawaringin Barat



Dr. Drs. H. Budi Santosa Sudarmadi, M. Si

Pangkalan Bun, Oktober 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas



Drs. EDY RAHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651225 199303 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMUEL, SST., MT**
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDY RAHMAN**
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

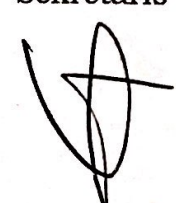
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman


Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama
Sekretaris

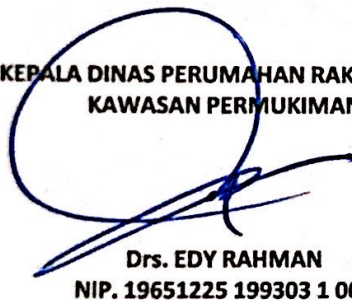

SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	98.5%


No	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 34,745,250
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3,626,245,938
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 44,630,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 209,084,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 308,339,018
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 249,560,674
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 218,855,460
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 38,116,300
Total		Rp 4,729,576,640

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



SAMUEL, S.T., MT
NIP.19700710 199803 1008

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	98.5%

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
**SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

SAMUEL, SST., MT
NIP.19700710 199803 1008



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111
Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPIUDIN, S.Hut**
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

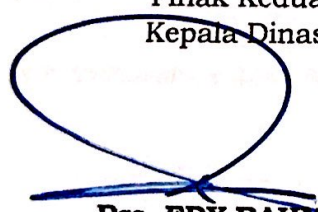
Nama : **Drs. EDY RAHMAN**
Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Kepala Dinas


Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pertanahan


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase jumlah sengketa yang di tangani	100%
2	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase sengketa ganti rugi tanah yang di selesaikan	100%
3	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah pemda yang di daftarkan sertifikasi	42.59%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 203,224,650
2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 60,589,900
3	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 344,496,790
Total		Rp 608,311,340

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

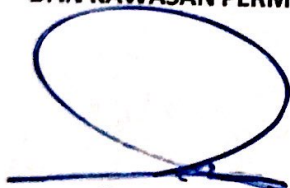


SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

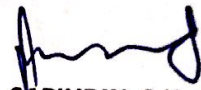
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prersentase jumlah sengketa yang di tangani	100%
2	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase sengketa ganti rugi tanah yang di selesaikan	100%
3	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah pemda yang di daftarkan sertifikasi	42.59%

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



SAPIUDIN, S.Hut
NIP. 19740806 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDY RAHMAN**

Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Drs. EDY RAHMAN

NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perumahan

LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.Si
NIP. 19700710 199603 1 005

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

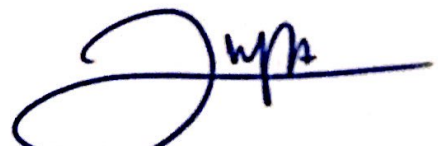
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana atau relokasi program	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	99%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 38,524,050
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rp 16,912,900
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rp 438,300,828
4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rp 2,820,000
5	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rp 3,248,000
6	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 14,667,612,151
Total		Rp 15,167,417,929

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**


Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

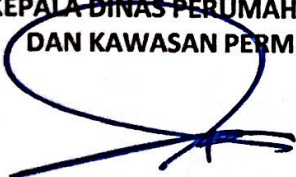
Pangkalan Bun, Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERUMAHAN


LETUS KILAT MANTIKELI, SH., M.SI
NIP.19700910 199603 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

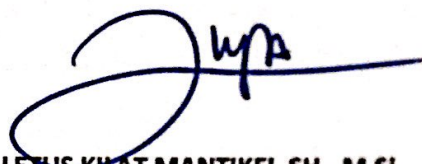
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban bencana atau relokasi program	100%
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	99%

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
KEPALA BIDANG PERUMAHAN



LETUS KILAT MANTIKEI, SH., M.SI
NIP.19700910 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Hasanudin Nomor 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKARDI, S.Pd**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDY RAHMAN**
Jabatan : Kepala Dinas

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
Kepala Dinas

Drs. EDY RAHMAN

NIP. 19651225 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Kawasan
Permukiman

SUKARDI, S.Pd

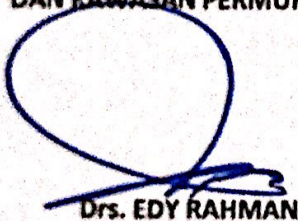
NIP. 19810111 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya Kawasan Permukiman	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	1.5%
2	Terlaksananya Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertangani	25.95%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Rp 600,398,349
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Rp 11,787,321,542
3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 299,450,200
Total		Rp 12,687,170,091

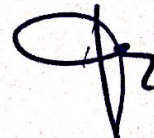
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN

NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



SUKARDI, S.Pd

NIP. 19810111 200501 1 009

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(Pejabat Ess. III ke Pejabat Ess. II)

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tertanganinya Kawasan Permukiman	Presentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	1.5%
2	Terlaksananya Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertangani	25.95%

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 009

Pangkalan Bun, Oktober 2024
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN**



SUKARDI, S.Pd
NIP. 19810111 200501 1 009

PROGRES RENCANA AKSI ESELON II TAHUN 2024 TVRI

Unit Kerja : Dinas Penanahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Dinas
Nama : Drs. EDY RAHMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
ST.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	0	0	0	97,94
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	0	0	0	8,71
ST.1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang/wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan penataannya	0	0	0	100
ST.2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	0	0	0	100

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Realisasi Triwulan				Hasil Evaluasi	Hambatan Capaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	√	√	√	√					Pada triwulan I melaksanakan survey dan koordinasi ke Desa terkait rencana pembangunan rumah bagi korban bencana		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan, serta mendorong bidang untuk secara masif melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa.
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	√	√	√	√					Kegiatan Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan diantaranya adalah Peningkatan PSU di Perumahan dan Permukiman di 52 lokasi, adapun sampai dengan triwulan I tahap yang tercapai adalah perumahan administrasi KAK, HPS, RAB dan kelengkapan dokumen tender		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	√	√	√	√					- Proses penyusunan Dokumen Rencana prioritas dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh - Survey, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kawasan kumuh - Sosialisasi terhadap 22 penerima bantuan perbaikan RTLH		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan Kawasan Kumuh	√	√	√	√					Tralah melaksanakan survey, verifikasi dan sosialisasi terhadap 11 penerima bantuan peningkatan RTLH di luar kawasan kumuh		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
5	Program Penyediaan Tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	√	√	√	√					- Pelaksanaan pemberian rekomendasi Stipulan telah dilaksanakan dengan baik sebanyak 13 Rekomendasi		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	√	√	√	√					- Pada triwulan I belum dilaksanakan Modifikasi atas laporan sengketa tanah garapan, dikarenakan tidak adanya permohonan modifikasi sengketa - Terlaksananya pengumpulan data dari Kelurahan/Desa sebagai bahan penyusunan Kajian inventarisasi Konflik, sengketa dan perkara pertanahan		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
7	Program Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Sengketa Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang diselesaikan	√	√	√	√					Melaksanakan koordinasi dengan Provinsi terkait kebijakan daerah terkait penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Sengketa Tanah untuk Pembangunan		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
8	Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	√	√	√	√					Kegiatan pemersihan penunjang Urutan Pemerintahan Daerah berjalan dengan lancar		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan

Pangkalan Bin, April 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Drs. EDY RAHMAN
NIP. 19651225 199303 1 008

PROGRES RENCANA AKSI ESELON II TAHUN 2024 TVRI

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Dinas
Nama : Drs. EDY RAHMANN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
ST 1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Penertasan Rumah Layak Huni	0	0	0	97,54
		Persentase Pemukiman Kumuh	0	0	0	8,71
ST 1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemukiman lahan yang sesuai dengan peruntukannya	0	0	0	100
ST 2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	0	0	0	100

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Realisasi Triwulan				Hasil Evaluasi	Harapan Capaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	√	√	√	√	-	-			Pada triwulan II melaksanakan survey dan koordinasi ke Desa terkait rencana pembangunan rumah bagi korban bencana (Realisasi indikator dapat diukur di akhir tahun)		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan, serta mendorong bidang untuk secara rutin melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa.
2	Program Peningkatan Pemukiman, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	√	√	√	√	-	-			Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan diantaranya adalah Peningkatan PSU di Perumahan dan Perumahan di 52 lokasi, adapun sampai dengan triwulan I tahap yang tercapai adalah pemenuhan administrasi KAK, HPS, RAB dan kelengkapan dokumen tender (Realisasi indikator dapat diukur di akhir tahun)		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target.
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan perumahan kumuh diarah 10 Hs yang terdengar	√	√	√	√	-	-			- Proses penyusunan Dokumen Rencana pemogahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh sudah terealisasi 50% - Survey, koordinasi dan sinkronisasi pemetaan kawasan kumuh - Kegiatan Pembinaan Pemukiman Kawasan kumuh di 10 lokasi pemukiman kumuh - Proses Rehabilitasi RTLH sudah berjalan 50% dari 22 Unit rumah yang direncanakan		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target.
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Pemukiman Kawasan Kumuh	√	√	√	√	-	-			Proses Pelaksanaan Peningkatan RTLH bagi 11 penerima bantuan peningkatan RTLH di kawasan kumuh telah tercapai 60%		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target.
5	Program Penatausahaan Tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	√	√	√	√	-	-			- Pelaksanaan pemberian rekomendasi Stopdan telah dilaksanakan dengan baik sebanyak 4 Rekomendasi (Realisasi indikator dapat diukur di akhir tahun)		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target.
6	Program Penyelidikan Sengketa Tanah Berspek	Persentase bidang tanah pemda yang disalurkan	√	√	√	√	-	-			- Pada triwulan II belum dilaksanakan Mediasi atas laporan sengketa tanah garapan, dikarenakan tidak adanya pemohonan mediasi sengketa. - Terakannya pengumpulan data dari Kelurahan/Desa sebagai bahan penyusunan Kajian Inerferensi Konflik, sengketa dan perkara pertanahan (Realisasi indikator dapat diukur di akhir tahun)		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
7	Program Penyelidikan Ganti Kerugian dan Sertuan Tanah untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang diselesaikan	√	√	√	√	-	-			Melaksanakan koordinasi dengan Provisur terkait sebanyak daerah terkait penyelesaian Ganti Kerugian dan Sertuan Tanah untuk Pembangunan sebanyak 4 kali (Realisasi indikator dapat diukur di akhir tahun)		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	√	√	√	√	25%	20%			Kegiatan pemenuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan lancar		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan

Pangkalan Bun, Juli 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Drs. EDY RAHMANN
NIP. 19651225 198303 1 009

PROGRES RENCANA AKSI/ ESEKON 1 TAHUN 2024 TW II

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Dinas
Nama : Drs. EDY RAHMAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
ST 1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	0	0	0	97,54
		Persentase Penataan Kawasan Kumuh	0	0	0	8,71
ST 1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya	0	0	0	100
ST 2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkot daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	0	0	0	100

No.	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Realisasi Triwulan				Hasil Evaluasi	Hambatan Capaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	√	√	√	√	-	-	-	-	Hasil identifikasi pendataan Pemenuhan Bantuan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena risiko akibat banjir diklati dalam rencana elaborasi program kebidan/kota sesuai dengan proposal dan laporan yang dikirim ke Desa, belum sesuai dengan kriteria Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 dan Permex PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Ketidak sesuaan antara data di lapangan/proposal data Desa dengan kriteria yang ada di lapangan	Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan, serta mendorong bidang untuk secara masif melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa.
2	Program Peningkatan Perairan, Sanitasi, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	√	√	√	√	-	-	-	-	Kegiatan Utusan Penyelenggaraan PSU Perumahan diantaranya adalah Penegakkan PSU di Perumahan dan Permukiman di 52 lokasi, sudah mulai dikerjakan pekerjaan sek di seluruh lokasi indikator dapat dukur di akhir tahun		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	√	√	√	√	-	-	-	-	- Proses penyusunan Dokumen Rencana pengapahan dari peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah dilaksanakan - Survey, koordinasi dan sintesis data perumahan kawasan kumuh - Peningkatan RTLH untuk 22 Pemenuhan telah dilaksanakan (Realisasi indikator dapat dukur di akhir tahun)		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
4	Program Penatahutan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan Kawasan Kumuh	√	√	√	√	-	-	-	-	Peningkatan RTLH di luar kawasan kumuh sebanyak 11 unit telah dilaksanakan 100% (Realisasi indikator dapat dukur di akhir tahun)		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
5	Program Penanganan Tanah	Persentase lahan yang dimanfaatkan	√	√	√	√	-	-	-	-	- Pelaksanaan pemberian rekomendasi Sediaan tanah dilaksanakan dengan baik sebanyak 9 Rekomendasi - Pelaksanaan Penertibatan Tanah sebanyak 2 Bidang (Realisasi indikator dapat dukur di akhir tahun)		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
6	Program Penyelidikan Sengketa Tanah Garapan	Persentase bidang tanah perdis yang diselesaikan	√	√	√	√	-	-	-	-	- Pada triwulan II telah diselesaikan Mediasi atas laporan sengketa tanah garapan sebanyak 4 laporan - Terselenggaranya pengumpulan data dari Kelurahan/Desa sebagai bahan penyusunan Kajian inventarisasi Konflik sengketa dan perkara perlawanan (Realisasi indikator dapat dukur di akhir tahun)		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
7	Program Penyelidikan Gerd Kerugian dan Sediaan Tanah Untuk Pengembangan	Persentase gerd rugi tanah yang diselesaikan	√	√	√	√	-	-	-	-	Melaksanakan koordinasi dengan Provinsi terkait kebijakan daerah terkait penyelesaian Gerd Kerugian dan Sediaan Tanah untuk Pemberian sebanyak 4 kali (Realisasi indikator dapat dukur di akhir tahun)		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
8	Program Penunjang Utusan Penyelenggaraan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penunjang Perangkot Daerah	√	√	√	√	25%	25%	25%	-	Kegiatan penunjang Utusan Penyelenggaraan Daerah berjalan dengan lancar		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan

Pangkalen Bun, Oktober 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Drs. EDY RAHMAN
NIP.196512251993031009

PROGRES RENCANA AKSI ESELON II TAHUN 2024 TW IV

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Desa
Nama : Drs. EDY RAHMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
ST 1.1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni Persentase Penataan Kawasan Kumuh	0	0	0	97,84
ST 1.2	Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten	Persentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya	0	0	0	100
ST 2.1	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	0	0	0	100

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Realisasi Triwulan				Hasil Evaluasi	Hambatan Capaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	√	√	√	√	-	-	-	-	Hasil identifikasi pendataan: Pemenuhan Bentuk Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat berada dikategori rawan bencana ataupun program kabupaten/kota sesuai dengan prosedur dan laporan yang dikirimkan Desa, belum sesuai dengan kriteria Pemeringkatan Nomor 56 Tahun 2021 dan Permenn PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kendak sesuai antara data laporan/proposal data Desa dengan kondisi yang ada di lapangan	Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan, serta mendorong bidang untuk secara masif melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa.
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	√	√	√	√	-	-	-	98,81%	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan diantaranya adalah Peningkatan PSU di Perumahan dan Permukiman di 52 lokasi (Anggaran Mumi) dan Tambahan di Perumahan sebanyak 30 Lokasi, dan 1 Lokasi tidak dapat diidentifikasi dikarenakan kendala alam, dan sampai batas akhir kontrak tidak dapat dilaksanakan		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 % yang tertangani	√	√	√	√	-	-	-	0,44%	<ul style="list-style-type: none"> Proses penyusunan Dokumen Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah dilaksanakan Survey, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kawasan kumuh telah dilaksanakan Peningkatan RTLH untuk 57 Penerima telah dilaksanakan Peningkatan Jalan/Drainase sebanyak 65 Paket telah dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya anggaran yang tersedia untuk mengkonstruksi unit-unit kegiatan yang ada. Masih kurangnya peran dari tokoh masyarakat, kepala desa dan aparat desa serta sektor swasta, dalam memfasilitasi kegiatan sehingga menghidupkan semangat gotong royong dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh. Kurangnya partisipasi pihak swasta, BUMN dan BUMD, dalam penyelesaian permasalahan kawasan kumuh. Belum maksimalnya peran polka dalam penumusan dan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh Belum dilaksanakannya identifikasi definisi kawasan kumuh pada tahun 2024 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat terkait lingkungan sehat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, selain itu juga telah dilaksanakan sosialisasi dengan pengembang perumahan terkait penanganan PSU maupun aset PSU Perumahan Telah dilaksanakannya penyusunan data base DED kawasan kumuh sebagai pernyataan dasar pengajuan kegiatan penanganan kawasan kumuh di tahun n+1, pada tahun 2024 telah disusun Penyusunan DED Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mendawai, Kelurahan Raja dan Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penataan Kawasan Kumuh	√	√	√	√	-	-	-	0,44%	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan RTLH di luar kawasan kumuh sebanyak 11 Unit telah dilaksanakan 100% 	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya ketidakeesuaian antara data identitas penerima bantuan yang dikirimkan dengan hasil pendataan verifikasi lapangan Adanya kendala kerjasama antara supplier dengan penerima bantuan. Masih kurangnya swadaya dari masyarakat (perihal dana tambahan ataupun biaya tukang) penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan SIRuttlh, (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni), aplikasi yang menjadi salah satu sumber data terkait RTLH yang dikelola oleh tim pengkaji dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Adanya kerjasama penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan berbagai pihak lintas sektor baik instansi vertikal maupun lembaga swasta, melalui sinergisan CSR maupun kerjasama lainnya, selain pada tahun 2024 telah dilaksanakan kerjasama dengan TNI, POLRI dan Badan Kabupaten Kotawaringin Barat Pengajuan Usulan Bantuan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kepada Kementerian PUPR dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Solusiusi terkait bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan. Pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang terjadi di lapangan
5	Program Penastaguan Tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	√	√	√	√	-	-	-	100%	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemberian rekomendasi Stepan telah dilaksanakan dengan baik sebanyak 26 Rekomendasi Pelaksanaan Pemsertifikatan Tanah sebanyak 2 Bidang 		Rutin melaksanakan evaluasi kepada bawahan dalam rangka percepatan pencapaian target
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	√	√	√	√	-	-	-	100%	<ul style="list-style-type: none"> Pada triwulan II telah dilaksanakan Mediasi atas laporan sengketa tanah garapan sebanyak 4 Laporan. Tertaksanya pengumpulan data dari Kelurahan/Desa sebagai bahan penyusunan Kajian Inventarisasi Konflik, sengketa dan perkara pertanahan 		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan

7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Sertunan Tanah Untuk Pembangunan	penertarikan ganti rugi tanah yang diselesaikan	√	√	√	√				100%	Melaksanakan koordinasi dengan Provinsi terkait kebijakan daerah terkait penyelesaian Ganti Kerugian dan Sertunan Tanah untuk Pembangunan sebanyak 4 kali		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan
8	Program Peningkat Uluhan Peningkatan Daerah karkupatan Kota	Penelitian capaian penguat Peningkat Daerah	√	√	√	√	25%	25%	25%	25%	Kegiatan pemenuhan penguat Uluhan Peningkatan Daerah berjalan dengan lancar		Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala kepada bawahan

Pangkalan Bun, Desember 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Drs. EDY SARDIAN
NIP. 19651225 199203 1 009

PROGRES RENCANA AKSI ESEON III TAHUN 2024
TRIWULAN I
BULAN : JANUARI,FEBRUARI,MARET 2024

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : SEKRETARIS
Nama : SAMUEL, SST.,MT

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan							Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I			II	III	IV				
							Januari	Februari	Maret							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun 2 Dokumen	√	√			0	0	1 Dok	0	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah terlaksana pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen			√	√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.III dan TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	√				0	0	1 Dok	0	0	0	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan pada TW.I	-	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 12 Laporan		√		√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.IV	Tidak ada hambatan, penyusunan mengacu kepada sistematika penyusunan yang disampaikan kepada SKPD dan telah diverifikasi bersama	(1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja dispermurutan perumahan permukiman dan pertanian (2) Penyusunan laporan dengan menyajikan kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (3) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja dispermurutan (4) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja dispermurutan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 4 Laporan	√	√			0	0	2 Lap	0	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana 50% pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bulan	√	√	√	√	1 OB	1 OB	1 OB	0	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah terlaksana sesuai dengan aliran kas yang disusun	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah 12 Dokumen	√	√	√	√	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0	0	0	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan telah terlaksana sesuai dengan aliran kas yang disusun	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan	√				0	0	1 Lap	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 18 Laporan	√	√	√		0	0	6 Lap	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD telah terlaksana pada TW.I selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
12	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				0	1 Dok	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	0	0	0	0	0	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan akan terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran

14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				0	6 Orang	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (8 Jenis)	√	√	√		0	1 Paket / 3 Jenis	0	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (30 Jenis)	√	√	√	√	0	1 Paket / 8 Jenis	0	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (17 Jenis)	√	√	√		0	1 Paket / 6 Jenis	0	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	0	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	0	0	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				0	0	15 Unit	0	0	0	Pengadaan Mebel dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	0	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana 50 % pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	0	0	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
24	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√	√	√	√	0		2 Unit	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I dan akan dilaksanakan per Triwulan	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
26	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	0	0	10 Unit	0	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

Pangkalan Bun, Maret 2024
SEKRETARIS



SAMUEL,SST.,MT
NIP. 19700710 199803 1 008

PROGRES RENCANA AKSI ESEON III TAHUN 2024
TRIWULAN II
BULAN : APRIL, MEI, JUNI 2024

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : SEKRETARIS
Nama : SAMUEL, SST.,MT

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II			III	IV			
								April	Mei	Juni					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun 2 Dokumen	√	√									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah terlaksana pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen			√	√							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.III dan TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	√										Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan pada TW.I	-	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 12 Laporan	√	√		√							sampai dengan triwulan 2 telah tersusun 1 laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu, dan laporan disusun berdasarkan data yang telah divalidasi/ hasil rapat. Pada triwulan 2 ini data yang tersusun pada bulan april adalah dokumen LPPD	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 4 Laporan	√	√	√	√							Sampai dengan triwulan 2 telah tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP yaitu laporan realisasi keuangan dan laporan progres pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 dokumen dimana penyusunan laporan dilakukan pada setiap akhir bulan	Laporan rfk dan laporan progres barang jasa tersusun sesuai dengan koordinasi dengan setiap bidang di lingkungan dispermim melalui rapat internal	(1) Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dispermim (2) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan pengadaan barang jasa
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bulan	√	√	√	√							Sampai dengan triwulan 2 sebanyak 7 dokumen penyediaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran iuran jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan ASN, penyediaan dilakukan secara berkala rutin perbulan dan dilakukan pada awal bulan berjalan	Tidak terdapat hambatan, penyediaan gaji dan tunjangan asn terlaksana tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN berjalan lancar dan sesuai jadwal
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah 12 Dokumen	√	√	√	√							Sampai dengan triwulan 2 sebanyak 6 dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana	Belum terdapat hambatan dimana penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd terlaksana sesuai ketentuan	(1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal (2) tidak adanya bagian verifikator keuangan sehingga penambahan SDM khususnya bagian verifikator keuangan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan	√										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 18 Laporan	√	√	√								Sampai dengan triwulan 2 telah tersusun sebanyak 9 laporan terkait keuangan berupa laporan SPJ keuangan perbulan, laporan DTH, dan pajak	Belum terdapat hambatan, setiap penyusunan laporan berkoordinasi dengan bpkad	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi keuangan dispermim
12	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran

13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	0	1 Paket	0	0	0	Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan akan terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (8 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	0	1 Paket / 3 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (30 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	0	1 Paket / 8 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (17 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	0	1 Paket / 6 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	0	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	0	4 Lap	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel telah dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	0	10 Unit	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	0	0	1 Unit	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya perencanaan telah dilaksanakan TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
24	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√	√	√	√	2 Unit	0	1 Unit	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I dan akan dilaksanakan per Triwulan	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
26	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

Pangkalan Bun, Juni 2024

SEKRETARIS



SAMUEL,SST.,MT

NIP. 19700710 199803 1 008

PROGRES RENCANA AKSI ESEON III TAHUN 2024
TRIWULAN III
BULAN : JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : SEKRETARIS
Nama : SAMUEL, SST.,MT

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III			IV			
									Juli	Agustus	September				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun 2 Dokumen	√	√			1 Dok	1 Dok	0	0	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah terlaksana pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen			√		0	0	0	0	1 Dok	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.III	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan pada TW.I	-	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 12 Laporan		√		√	0	6 Lap		0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 4 Laporan	√	√			2 Lap	2 Lap		0	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana 50% pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bulan	√	√	√	√	3 OB	3 OB	1 OB	1 OB	1 OB	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah terlaksana sesuai dengan aliran kas yang disusun	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah 12 Dokumen	√	√	√	√	3 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan telah terlaksana sesuai dengan aliran kas yang disusun	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan	√				1 Lap	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 18 Laporan	√	√	√		6 Lap	6 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD telah terlaksana pada TW.I selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
12	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	1 Paket	0	0	0	0	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan telah terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (9 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	1 Paket / 4 Jenis	1 Paket / 1 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (37 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (15 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	4 Lap	0	6 Lap	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel akan dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	10 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana 100 % pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	1 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada Perencanaannya Telah terlaksana di TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
24	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√				5 Unit	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

26	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	10 Unit	0	5 Unit	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---------	---------	---	--------	--------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Pangkalan Bun, September 2024

SEKRETARIS



SAMUEL,SST.,MT
NIP. 19700710 199803 1 008

PROGRES RENCANA AKSI ESEON III TAHUN 2024

TRIWULAN IV

BULAN : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : SEKRETARIS
Nama : SAMUEL, SST.,MT

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV					
										Oktober	November	Desember			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun 2 Dokumen	√	√			1 Dok	1 Dok	0	0	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah terlaksana pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen			√		0	0	1 Dok	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.III	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	JumlahDokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan pada TW.I	-	Dokumen DPA-SKPD TA.2024 telah disusun sebanyak 1 Dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun 1 Dokumen				√	0	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan dilaksanakan pada TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD akan terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun 12 Laporan		√		√	0	6 Lap		0	0	6 Lap	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.IV	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun 4 Laporan	√	√			2 Lap	2 Lap		0	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana 50% pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bulan	√	√	√	√	3 OB	3 OB	3 OB	1 OB	1 OB	1 OB	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah terlaksana sesuai dengan aliran kas yang disusun	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah 12 Dokumen	√	√	√	√	3 Dok	3 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan telah terlaksana sesuai dengan aliran kas yang disusun	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan	√				1 Lap	0	0	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 18 Laporan	√	√	√		6 Lap	6 Lap	6 Lap	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD telah terlaksana pada TW.I selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
12	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	1 Paket	0	0	0	0	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan telah terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (9 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	1 Paket / 4 Jenis	1 Paket / 1 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (37 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	0	1 Paket / 7 Jenis	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (15 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	0	2 Paket / 2 Jenis	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	4 Lap	6 Lap	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit		√			15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit	√	√			0	10 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana 50 % pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	1 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
24	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√				5 Unit	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

26	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	--------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Pangkalan Bun, Desember 2024

SEKRETARIS



SAMUEL,SST.,MT
NIP. 19700710 199803 1 008

RENCANA AKSI ESELON III

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.SI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	√	√	√	√	Percepatan Pendataan dengan cara survey dan permintaan data melalui via media elektronik
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	√	√	√	√	Percepatan Proses Perencanaan Penanganan Pekerjaan dilapangan

Pangkalan Bun, Januari 2024
Kepala Bidang
Perumahan Rakyat


LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.SI
NIP. 19700910 199603 1 005

PROGRESS RENCANA AKSI ESELON III TW. I TAHUN 2024

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.Si

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/Capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Target				Capaian Progres TW. I			Hambatan	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I				
							Jan	Feb	Mar		
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%	-	-	-	Tidak Ada	Percepatan Pendataan dengan cara survey dan permintaan data melalui media elektronik
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%	-	-	-	Tidak Ada	Percepatan Proses Perencanaan Penanganan Pekerjaan lapangan

Pangkalan Bun, Maret 2024

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat


 LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.Si
 NIP. 19700910 199603 1 005

RENCANA AKSI ESELON III

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEL, SH.,M.SI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1	Tertaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	√	√	√	√	Percepatan Pendataan dengan cara survey dan permintaan data melalui via media elektronik
2	Tertaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	√	√	√	√	Percepatan Proses Perencanaan Penanganan Pekerjaan dilapangan

Pangkalan Bun, 1 April 2024
 Kepala Bidang
 Perumahan Rakyat


 LETUS KILAT MANTIKEL, SH.,M.SI
 NIP. 19700910 199603 1 005

PROGRESS RENCANA AKSI ESELON III TW. II TAHUN 2024

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEL, SH.,M.Si

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/Capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Target				Capaian Progres TW. II			Hambatan	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Capaian Progres TW. II				
							Apr	Mei	Juni		
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%	3 Lokasi	2 Lokasi	-	Identifikasi Pendataan Penerima Bantuan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat berada di lokasi rawan bencana ataupun program kabupaten/kota sesuai hasil proposal dan laporan yang di kirimkan pihak desa belum masuk ke dalam kriteria yang sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Percepatan Pendataan dengan cara survey dan pemintaan data melalui via media elektronik
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%	-	-	52 Lokasi	Tidak Ada	Percepatan Proses Perencanaan Penanganan Pekerjaan di lapangan

Pangkalan Bun, 7 Juni 2024

Kepala Bidang
 Perumahan Rakyat


 LETUS KILAT MANTIKEL, SH.,M.Si
 NIP. 19700910 199603 1 005

RENCANA AKSI ESELON III

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEL, SH.,M.Si

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1	Tertaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	√	√	√	√	Identifikasi lebih detail untuk pendataan sasaran penerima bantuan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana berdasarkan Nomor 59 Tahun 2021 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2	Tertaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	√	√	√	√	Percepatan Proses Perencanaan Penanganan Pekerjaan dilapangan

Pangkalan Bun, 30 September 2024

Kepala Bidang
 Perumahan Rakyat

LETUS KILAT MANTIKEL, SH.,M.Si
 NIP. 19700910 199603 1 005

PROGRESS RENCANA AKSI ESELON III TW. III TAHUN 2024

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.SI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Target				Capaian Progres TW. III			Hambatan	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Capaian Progres TW. III				
							Jul	Agustus	September		
1	Tertaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%	-	-	-	Identifikasi Pendataan Penerima Bantuan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat berada di lokasi rawan bencana ataupun program kabupaten/kota sesuai hasil proposal dan laporan yang di kirimkan pihak desa belum masuk ke dalam kriteria yang sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Percepatan Pendataan dengan cara survey dan pemrintaan data melalui via media elektronik
2	Tertaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%	-	-	71 Lokasi	Tidak Ada	Percepatan Proses Perencanaan Penanganan Pekerjaan dilapangan

Pangkalan Bun, 30 September 2024

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat

LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.SI
NIP. 19700910 199603 1 005

RENCANA AKSI ESELON III

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.SI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	√	√	√	√	Identifikasi lebih detail untuk pendataan sasaran penerima bantuan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana berdasarkan Nomor 59 Tahun 2021 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	√	√	√	√	Percepatan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Fisik Konstruksi

Pangkalan Bun, 2 Januari 2025

Kepala Bidang

Perumahan Rakyat


 LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.SI

NIP. 19700910 199603 1 005

PROGRESS RENCANA AKSI ESELON III TW. IV TAHUN 2024


Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jabatan : KABID PERUMAHAN RAKYAT
 Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.Si

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Hasil/capaian	Target Tahun 2024			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Kualitas Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman serta Pertanian	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	99%

No	Aksi	Indikator	Target				Capaian Progres TW. IV			Hambatan	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Oktober	November	Desember		
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Prosentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana/Relokasi Program	-	-	-	0%	-	-	-	Identifikasi Pendataan Penerima Bantuan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat berada di lokasi rawan bencana ataupun program kabupaten/kota sesuai hasil proposal dan laporan yang di kirimkan pihak desa belum masuk ke dalam kriteria yang sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Perlu kajian khusus untuk penentuan penerima bantuan yang belum memiliki lahan sebagai lahan potensial untuk relokasi bagi yang terkena dampak bencana
2	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Perumahan yang dilengkapi PSU	-	-	-	98,59%	52 Lokasi	-	18 Lokasi	Dari 71 lokasi ruas yang dikerjakan 1 lokasi tidak dapat dilaksanakan akibat terkendala iklim dan rentang waktu untuk jadwal pelaksanaan tidak dapat di tambah karena sudah tenggat waktu akhir tahun pencairan untuk pekerjaan fisik di tahun anggaran perubahan 2024	Pemutusan kontrak antara pengguna jasa dan pihak penyedia jasa

Pangkalan Bun, 2 Januari 2025

Kepala Bidang
Perumahan Rakyat


 LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.Si
 NIP. 19700910 199603 1 005

PROGRES RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024 (TRIWULAN I)

Unit Kerja : DISPERKIM
Jabatan : KABID PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Nama : SUKARDI, S.Pd

NO	Kegiatan	Indikator Hasil/Capaian Kegiatan/Keluaran	Target			
			I	II	III	IV
	Capaian Kinerja dengan Target yang Baru					
1	Tertangannya kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		0.500%	0.500%	5.000%
	Terlaksananya kegiatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase kawasan permukiman yang tertangani		8.650%	8.650%	8.650%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh (2 dokumen)		√	√						Triwulan I Belum terlaksana karena kegiatan masih dalam pengajuan proses pengadaan dan lelang	Tidak ada kendala	Mempercepat melakukan tender agar proses pencapaian pelaksanaan pekerjaan bisa maksimal dengan baik
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni (22 Unit)	√	√	√	√	√				di triwulan I Sosialisasi Kepada Calon Penerima Bantuan	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
3	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana permukiman kumuh yang dibangun (49 Pakett)	√	√	√		√				Triwulan I Telah terlaksananya kegiatan Survey dan Monitoring Penyelenggaraan Peremajaan kawasan Permukiman Kumuh	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni (11 Unit)	√	√	√	√	√				di triwulan I Sosialisasi Kepada Calon Penerima Bantuan dan sekaligus melakukan survey awal	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun

Pangkalan Bun, Maret 2024
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



SUKARDI, S.Pd
NIP. 19810111 200801 1 009

PROGRES RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024 (TRIWULAN II)

Unit Kerja : DISPERKIM
 Jabatan : KABID PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Nama : SUKARDI, S.Pd

NO	Kegiatan	Indikator Hasil/Capaian Kegiatan/Keluaran	Target			
			I	II	III	IV
	Capaian Kinerja dengan Target yang Baru					
1	Tertanganinya kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		0.500%	0.500%	5.000%
	Terlaksananya kegiatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase kawasan permukiman yang tertangani		8.650%	8.650%	8.650%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh (2 dokumen)		√	√			√			Triwulan II Sudah terlaksana 50%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni (22 Unit)	√	√	√	√	√	√			Triwulan II Sudah terlaksana 80%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
3	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana permukiman kumuh yang dibangun (49 Pakett)	√	√	√		√	√			Triwulan II dalam proses pengadaan	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni (11 Unit)	√	√	√	√	√	√			Triwulan II Sudah terlaksana 80%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun

Pangkalan Bun, Juni 2024

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



SUKARDI, S.Pd
 NIP. 19810111 200801 1 009

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024 (TRIWULAN III)

Unit Kerja : DISPERKIM
 Jabatan : KABID PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Nama : SUKARDI, S.Pd

NO	Kegiatan	Indikator Hasil/Capaian Kegiatan/Keluaran	Target			
			I	II	III	IV
	Capaian Kinerja dengan Target yang Baru					
1	Tertanganinya kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		0,500%	0,500%	5,000%
	Terlaksananya kegiatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase kawasan permukiman yang tertangani		8,650%	8,650%	8,650%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh (2 dokumen)		✓	✓			✓	✓		Triwulan III sudah Terlaksana 50 %	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni (22 Unit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Triwulan III sudah Terlaksana 90 %	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
3	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana permukiman kumuh yang dibangun (49 Paket)	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Triwulan III pelaksanaan pekerjaan fisik	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni (11 Unit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Triwulan II sudah Terlaksana 90 %	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun

Pangkalan Bun, 30 September 2024

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



SUKARDI, S.Pd
 NIP. 19810111 200801 1 009

RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2024 (TRIWULAN IV)

Unit Kerja : DISPERKIM
 Jabatan : KABID PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Nama : SUKARDI, S.Pd

NO	Kegiatan	Indikator Hasil/Capaian Kegiatan/Keluaran	Target			
			I	II	III	IV
	Capaian Kinerja dengan Target yang Baru					
1	Tertanganinya kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani		0,500%	0,500%	5,000%
	Terlaksananya kegiatan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase kawasan permukiman yang tertangani		8,650%	8,650%	8,650%

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan				Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh (2 dokumen)		✓	✓	✓		✓	✓		Triwulan IV pelaksanaan mencapai 100%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Jumlah rumah tidak layak huni (57 Unit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Triwulan IV pelaksanaan mencapai 100%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
3	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah sarana dan prasarana permukiman kumuh yang dibangun (65 Paket)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Triwulan IV pelaksanaan mencapai 100%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni (11 Unit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Triwulan IV pelaksanaan mencapai 100%	Tidak ada kendala	pelaksanaan menyesuaikan jadwal yang telah disusun

Pangkalan Bun, 31 Desember 2024

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN



SUKARDI, S.Pd
 NIP. 19810111 200801 1 009

**RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Prersentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	10	4
c.	Penggunan Tanah	Prersentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	2	3	2	3
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjuti	5	5	5	4
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1.a.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng	Jumlah rekomendasi Siteplan yang diterbitkan					Menyesuaikan permohonan pengesahan siteplan dari pengembang/ masyarakat
b.	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					
c.	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/ Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					Koordinasi dan Sosialisasi ke Desa/ Kecamatan se Kab Ktw Barat
2.a.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti					Koordinasi Lintas Sektor
b.	Terlaksananya Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					Koordinasi
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengumpulan Data	Jumlah Kegiatan koordinasi					Penyampaian informasi melalui sosialisasi

Pangkalan Bun, 01 April 2024
Kepala Bidang Pertanahan,

SAPIUDIN, S.Hut

Penata Tk I

NIP. 19740806 199403 1 004

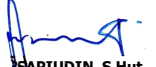
**PROGRES RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN I TAHUN 2024**

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Sasaran	Indikator	Target Trw			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Prersentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	10	4
c.	Penggunan Tanah	Prersentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	2	3	2	3
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjuti	5	5	5	4
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan			Realisasi Capaian	Hasil Evaluasi	Hambatan	Strategi Pencapaian
			Jan	Pebr	Mar				
1.a.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng	Jumlah rekomendasi Siteplan yang diterbitkan					Pelaksanaan Trw III	-	-
b.	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat	-	-	-	13	Rapat FasilitasinSengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Tidak ada penyampaian mohon fasilitasi	Fasilitasi Sengketa Pertanahan dilaksanakan apabila ada laporan yang masuk dan sesuai perintah dari Bupati/ Sekda
c.	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/ Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat	-	-	1	1	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi		
2.a.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	-			5	Sudah dilaksanakan koordiani	Tidak ada	Komunikasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa
b.	Terlaksananya Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	2	3	5	Sudah disusun laporan	Tidak ada	Memberikan tenggat waktu kepada aparaturnya desa untuk permintaan data
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengumpulan Data	Jumlah Kegiatan koordinasi	1	1	1	3	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Pendataan	Tidak ada	Peningkatan koordinasi dengan ATR-BPN dalam rangka pemenuhan data lahan/ tanah yang bersertifikat

Pangkalan Bun, 01 April 2024
Kepala Bidang Pertanahan,


SAPIUDIN, S.Hut
Penata Tk I
NIP. 19740806 199403 1 004

**RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Prersentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	10	4
c.	Penggunan Tanah	Prersentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	2	3	2	3
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjuti	5	5	5	4
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1.a.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng	Jumlah rekomendasi Siteplan yang diterbitkan					Menyesuaikan permohonan pengesahan siteplan dari pengembang/ masyarakat
b.	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					
c.	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/ Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					Koordinasi dan Sosialisasi ke Desa/ Kecamatan se Kab Ktw Barat
2.a.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti					Koordinasi Lintas Sektor
b.	Terlaksananya Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					Koordinasi
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengumpulan Data	Jumlah Kegiatan koordinasi					Penyampaian informasi melalui sosialisasi

Pangkalan Bun, 02 Juli 2024
Kepala Bidang Pertanahan,

SAPIUDIN, S.Hut

Penata Tk I

NIP. 19740806 199403 1 004


**PROGRES RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN II TAHUN 2024**

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Sasaran	Indikator	Target Trw			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Prersentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	10	4
c.	Penggunan Tanah	Prersentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	2	3	2	3
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjuti	5	5	5	4
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan			Realisasi Capaian Triwulan II	Hasil Evaluasi	Hambatan	Strategi Pencapaian
			Apr	Mei	Jun				
1.a.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng	Jumlah rekomendasi Siteplan yang diterbitkan					Pelaksanaan Trw III	-	-
b.	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Siteplan yang diberikan	-	-	-	4	Sesuai jumlah pengajuan pemohon/ pengembang	-	-
c.	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/ Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat	-	-	3	3			
2.a.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti	-			1	Sudah dilaksanakan koordiani	Tidak ada	Komunikasi dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa
b.	Terlaksananya Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	-	1	1	Sudah disusun laporan	Tidak ada	Memberikan tenggat waktu kepada aparat desa untuk permintaan data
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengumpulan Data	Jumlah Kegiatan koordinasi		1		1	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Pendataan	Tidak ada	Peningkatan koordinasi dengan ATR-BPN dalam rangka pemenuhan data lahan/ tanah yang bersertifikat

Pangkalan Bun, 02 Juli 2024
Kepala Bidang Pertanahan,


SAPIUDIN, S.Hut
 Penata Tk I
 NIP. 19740806 199403 1 004

RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN III TAHUN 2024

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
	a. Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkajene Bonteng			1	
	b. Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	10	4
2.	c. Penggunan Tanah	Persentase bidang tanah penda yang didaftarkan	2	3	2	3
	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjut	5	0	4	4
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	1	3	3	1

No	Aksi	Indikator	Jadwal				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1. a.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkajene Bonteng	Jumlah rekomendasi Siteplan yang diterbitkan					Menyusulkan permohonan pengesahan siteplan dari penguasa/pemrakat
	b.	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota					Berkordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian target yang diberikan
	c.	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/ Kota					Koordinasi dan Sosialisasi ke Desa/ Kecamatan se Kab Ktw Barat
2. a.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					Koordinasi Lintas Sektor
	b.	Terlaksananya Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					Koordinasi
	3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengumpulan Data					Penyampaian informasi melalui sosialisasi program pemerintah

Pangkajene, 01 Oktober 2024
Kepala Bidang Pertanahan,


SAPIUDIN, S.Hut
Penata Tk I
NIP. 19740806 199403 1 004

PROGRES RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN III TAHUN 2024

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hampirnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Persentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	9	4
c.	Penggunaan Tanah	Persentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	2	3	2	3
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjut	5	0	4	4
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Rugi dan Sertunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemmasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	1	3	3	1

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan		Realisasi Capaian	Hasil Evaluasi	Hambatan	Strategi Pencapaian
			Jul	Agust	Sept			
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Zona Nilai Tanah di Wilayah Kecamatan Arit Selditan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Zona Nilai Tanah	0	0	1	1	Tidak ada	Peningkatan koordinasi dengan aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka koordinasi
2	Terlaksananya Pelayanan Pengesahan Siteplan	Jumlah Pelayanan Pengesahan Siteplan	6	2	2	10	Masih ada masyarakat/ pengembang yang memahami masalah siteplan	Melakukan koordinasi dan penyebaran informasi terkait kegunaan dan manfaat Siteplan
3	Pengumpulan data lapangan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data Lahan Permukiman Jumlah Sengketa Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	4	-	-	Tidak ada	10
4	Terlaksananya Pelayanan Pengesahan Siteplan	Jumlah Pelayanan Pengesahan Siteplan	-	0	0	0	-	-
5	Terlaksananya Pelayanan Pengesahan Siteplan	Jumlah Pelayanan Pengesahan Siteplan	0	0	4	4	Dalam fasilitasi tidak selesai dalam 1 (satu) kali pertemuan	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar segera ditindaklanjuti penyelesaian sengketa
6	Bersinergi dengan Kantor ATR-BPN Kotawaringin Barat dalam mendapatkan informasi dan pelaksanaan kegiatan reforma agraria	Jumlah Data Tanah yang Sudah dan Belum Bersertifikat di Kab Kotawaringin Barat	1	1	1	3	Tidak bersedianya masyarakat menyampaikan informasi dan lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa/ kelurahan	Melakukan sosialisasi dan koordinasi pihak terkait

Pangkalan Bun, 01 Oktober 2024
Kepala Bidang Pertanahan,

SAPIUDIN, S.Hut
Penata Tk I
NIP. 19740806 199403 1 004

LAPORAN HASIL KINERJA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN
Triwulan III
(Juli s/d September 2024)

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Kepala Bidang Pertanahan memfunyai tugas pokok membuat rencana program kerja Bidang Pertanahan pada Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Bidang Pertanahan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan rencana program kerja Bidang Pertanahan pada Kawasan Perumahan dan Permukiman.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Pertanahan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan tanah pada kawasan perumahan dan permukiman.
5. Menganalisa dan mengkaji penggunaan tanah pada kawasan Perumahan dan Permukiman sesuai prosedur peraturan perundangan yang berlaku.
6. Menyajikan pertimbangan teknis penggunaan tanah pada kawasan Perumahan dan Permukiman berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Melaksanakan koordinasi dengan SOPD / Unit kerja lain terkait Bidang Pertanahan sesuai peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan evaluasi penyiapan bahan rumusan kebijakan.
8. Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan dilingkungan Bidang Pertanahan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan dan bahan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas pertanahan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

B.1. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Bidang Pertanahan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin barat untuk mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah Garapan	Prosentase Konflik-konflik pertanahan yang ditangani	100 %
2.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase ganti kerugian dan santunan tanah yang ditindaklanjuti	100%
3.	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah Pemda yang didaftarkan	42,02% (10 Dok)

B.2. Rencana Kinerja

Guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maka disusun Rencana Aksi Kepala Bidang Pertanahan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Jadwal Pelaksanaan			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
	a. Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	a. Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah KecPangkalan Banteng				
	b. Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	b. Prersentase Jumlah rekomen-dasi siteplan yang terbit.				
	c. Penggunaan Tanah	c. Prersentase bidang tanah pemda yang didaftarkan				
2	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase ganti kerugian dan santunan tanah yang ditindaklanjuti				
3	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti				

B.3. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Triwulan III I 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Keterangan
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota a. Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	a. Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kec Pangkalan Banteng	100%	
	b. Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	b. Prersentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit.	9	
	c. Penggunan Tanah	c. Prersentase bidang tanah Pemda yang didaftarkan	2	
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase ganti kerugian dan santunan tanah yang ditindaklanjuti	4 Laporan	
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	3 Laporan	

B.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penggunaan Tanah dengan Pagu Kegiatan Rp. 334.795.096,-, berdasarkan target kegiatan pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan) persetujuan rekomendasi.

Sedangkan secara keseluruhan Sub Kegiatan TA 2024 pada Triwulan III untuk realisasi fisik sebesar 42,66% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.924.627,-.

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 217.518.650,-. Adapun realisasi kegiatan inventarisasi sengketa sampai dengan Triwulan III sebanyak 4 (empat) kali.

Sedangkan realisasi anggaran secara keseluruhan pada Triwulan III untuk realisasi fisik sebesar 16% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.488.650.-

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, berdasarkan Pagu Anggaran yang diberikan sebesar R-. 56.000.000,-.

Adapun realisasi fisik anggaran sampai dengan Triwulan III sebanyak 51% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.800.400,-

B.5. Rencana Tindak Lanjut Pencapaian Pelaksanaan

- a. Melakukan sosialisasi pentingnya adanya Siteplan bagi pengembang perumahan dan kavling tanah dalam rangka pemecahan sertifikat/ Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
- b. Melakukan koordinasi lebih intensif terkait fasilitasi penanganan masalah tanah dengan pihak Bagian Pemerintahan dan kecamatan.
- c. Dalam hal rencana pengadaan tanah agar dilakukan koordinasi dengan yang terkait seperti Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah serta Dinas lain yang sekiranya akan melakukan pengadaan tanah.

B.6. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pelaporan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

PangkalanBun, 02 Oktober 2024

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Drs. EDI RAHMAN

Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19651225 199304 1 009

KEPALA BIDANG PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

SAPTUDIN, S.Hu

SAPTUDIN, S.Hut

Penata Tk I (III/d)

NIP. 197408061994031004

Tanggapan/ Masukan Atasan Langsung :

Terus paku realwen kajistannyn


**RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapiudin, S.Hut

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Presentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	10	4
c.	Penggunaan Tanah	Presentase bidang tanah pemda yang didaftarkan	2	3	2	3
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjuti	5	0	4	4
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	1	3	3	1

No	Aksi	Indikator	Jadwal				Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	
1. a.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Identifikasi Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangkalan Banteng	Jumlah rekomendasi Siteplan yang diterbitkan					Menyesuaikan permohonan pengesahan siteplan dari pendoembang/ masyarakat
b.	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					Berkoodinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian target yang diberikan
c.	Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Pendataan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/ Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang didaftarkan sertifikat					Koordinasi dan Sosialisasi ke Desa/ Kecamatan se Kab Ktw Barat
2. a.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti					Koordinasi Lintas Sektor
b.	Terlaksananya Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten					Koordinasi
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengumpulan Data	Jumlah Kegiatan koordinasi					Penyampaian informasi melalui sosialisasi program pemerintah

Pangkalan Bun, 02 Januari 2025
Kepala Bidang Pertanahan,


SAPIUDIN, S.Hut

Penata Tk I

NIP. 19740806 199403 1 004

**PROGRES RENCANA AKSI ESSELON III
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan
Nama : Sapudin, S.Hut

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					
a.	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kecamatan Pangkalan Banteng			1	
b.	Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	Presentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit	8	8	9	4
c.	Penggunaan Tanah	Presentase bidang tanah pmda yang didaftarkan	2	3	2	118
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditindak lanjuti	5	0	4	4
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	1	3	3	1

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan			Realisasi Capaian sd Triwulan IV	Hasil Evaluasi	Hambatan	Strategi Pencapaian
			Okt	Nov	Des				
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Zona Nilai Tanah di Wilayah Kecamatan Arut Selatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Zona Nilai Tanah	0	1	0	1	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Tidak ada	Peningkatan koordinasi dengan aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka koordinasi dan Sinkronisasi Zona Nilai Tanah
2	Terlaksananya Pelayanan Pengesahan Siteplan	Jumlah Pelayanan Pengesahan Siteplan	1	0	0	29	Terlaksananya kegiatan pelayanan pengesahan siteplan	Masih ada masyarakat/ pengembang yang memahami masalah siteplan	Melakukan koordinasi dan penyebaran informasi terkait kegunaan dan manfaat Siteplan
3	Pengumpulan data lapangan	Jumlah data Lahan Permukiman	-	56	55	111	Sudah disampaikan ke Bidang Aset BKAD	Peralatan belum memadai	Koordinasi dengan instansi teknis
4	Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sengketa Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	1	-	1	Terlaksana Inventarisasi sengketa pertanahan	-	-
5	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sengketa Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi penyelesaiannya	0	0	4	13	Rapat Fasilitasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Dalam fasilitasi tidak selesai dalam 1 (satu) kali pertemuan	Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar segera ditindaklanjuti penyelesaian sengketa
6	Bersinergi dengan Kantor ATR-BPN Kotawaringin Barat dalam mendapatkan informasi dan pelaksanaan kegiatan reforma agraria	Jumlah Data Tanah yang Sudah dan Belum Bersertifikat di Kab Kotawaringin Barat	1	1	1	6	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan Pendataan	Tidak bersedianya masyarakat menyampaikan informasi dan lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa/ kelurahan	Melakukan sosialisasi dan koordinasi pihak terkait

Pangkalan Bun, 02 Januari 2025

Kepala Bidang Pertanahan,


SAPUDIN, S.Hut

Penata Tk I

NIP. 19740806 199403 1 004

LAPORAN HASIL KINERJA KEPALA BIDANG PERTANAHAN

Triwulan IV

(Oktober s/d Desember 2024)

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membuat rencana program kerja Bidang Pertanahan pada Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Bidang Pertanahan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan rencana program kerja Bidang Pertanahan pada Kawasan Perumahan dan Permukiman.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bidang Pertanahan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan tanah pada kawasan perumahan dan permukiman.
5. Menganalisa dan mengkaji penggunaan tanah pada kawasan Perumahan dan Permukiman sesuai prosedur peraturan perundangan yang berlaku.
6. Menyajikan pertimbangan teknis penggunaan tanah pada kawasan Perumahan dan Permukiman berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Melaksanakan koordinasi dengan SOPD / Unit kerja lain terkait Bidang Pertanahan sesuai peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan evaluasi penyediaan bahan rumusan kebijakan.
8. Memeriksa dan mengevaluasi tugas bawahan dilingkungan Bidang Pertanahan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan dan bahan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas pertanahan.

B.3. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Triwulan IV 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Indikator	Capaian	Keterangan
1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah Kec Pangkalan Banteng	100%	
	b. Pemberian izin Lokasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota	b. Persentase Jumlah rekomendasi siteplan yang terbit.	1	
	c. Penggunaan Tanah	c. Persentase bidang tanah Pemda yang didaftarkan	111	
2.	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase ganti kerugian dan santunan tanah yang ditindaklanjuti	4 Laporan	
3.	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Permasalahan Ganti Rugi yang ditindaklanjuti	3 Laporan	

B.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penggunaan Tanah dengan Pagu Kegiatan Rp. 203.224,650-.

Berdasarkan target pengesahan siteplan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) persetujuan rekomendasi siteplan yang diterbitkan.

Sedangkan secara keseluruhan Sub Kegiatan TA 2024 (Anggaran Perubahan) pada Triwulan IV untuk realisasi fisik sebesar 78% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 269.654.057,-.

Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 203.224.650,-.

Adapun realisasi kegiatan inventarisasi sengketa sampai dengan Triwulan IV sebanyak 4 (empat) kali.

Sedangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 (Perubahan) sampai dengan Triwulan IV untuk realisasi fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp193.984.050,-

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, berdasarkan Pagu Anggaran (Perubahan) yang diberikan sebesar -. 60.589.900,-.

Adapun realisasi fisik anggaran sampai dengan Triwulan IV sebanyak 90% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.339.216,-

,

B.5. Rencana Tindak Lanjut Pencapaian Pelaksanaan

- a. Melakukan sosialisasi pentingnya adanya Siteplan bagi pengembang perumahan dan kavling tanah dalam rangka pemecahan sertifikat/ Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
- b. Dalam upaya pensertipikatan aset berupa tanah makam dan tanah dibawah jalan akan terus berkoordinasi dengan pihak Kantor Peretananhan (Kanta) Kab Kotawaringin Barat dan Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Melakukan koordinasi lebih intensif terkait fasilitasi penanganan masalah tanah dengan pihak Bagian Pemerintahan dan kecamatan.
- d. Dalam hal rencana pengadaan tanah agar dilakukan koordinasi dengan yang terkait seperti Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah serta Dinas lain yang sekiranya akan melakukan pengadaan tanah.

B.6. Penutup

Demikian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini dibuat sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pelaporan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

PangkalanBun, 2 Januari 2025

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERUMKINAN,

KEPALA BIDANG PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Drs. EDI RAHMAN

Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19651225 199304 1 009

APTUDIN, S. Hut

Penata Tk I (III/d)
NIP. 197408061994031004

Tanggapan/ Masukan Atasan Langsung :

Terminskel atur pancaprianya po th 2024 in:

.....

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2024 TRIWULAN I

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran, Dan Akuntansi
Nama : Muhammad Dhyanto, S.Kom

NO	Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	6 Dok	7 Dok	4 Dok
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	7 Dok	8 Dok

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan 1			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Jan	Feb	Mar			
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		√	√							
2	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD			√							
3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD			√							
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	√							Dokumen DPA SKPD TA 2024 telah disusun sebanyak 1 dokumen beserta dokumen anggaran kas dengan tepat dan sesuai dengan schedule penyusunan		(1) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan serta rencana kebutuhan barang milik daerah (2) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang-bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan kode belanja (3) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan/ penplotan anggaran kas sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan sesuai kebutuhan setiap bulannya
5	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun			√							
6	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	√	√		√				Sampai dengan triwulan 1 telah tersusun 2 dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan tepat waktu, dan laporan di susun berdasarkan data yang telah di validasi/ hasil rapat. Pada triwulan 1 ini data yang tersusun meliputi dokumen LKPJ dan LKJIP	Tidak terdapat hambatan, penyusunan mengacu pada sistematika penyusunan yg disampaikan kepada SKPD dan data yg terdapat dalam lkjip dan lkjip telah diverifikasi bersama dalam rapat internal	(1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja dispermukiman dan pertanahan (2) Penyusunan laporan dengan menyajikan kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (3) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja dispermukiman (4) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja dispermukiman (5) Penyusunan laporan sesuai dengan sistematika yang telah diatur dalam keputusan Bupati Ktw. Barat No. 243 Tahun 2019 tentang penetapan sistematika LKJIP PI di lingkungan Pemkab kobar agar dokumen dapat tersusun dengan memenuhi aspek kualitas

7	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 1 telah tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP yaitu laporan realisasi keuangan dan laporan progres pengadaan barang dan jasa sebanyak 3 dokumen dimana penyusunan laporan dilakukan pada setiap akhir bulan	Laporan rtk dan laporan progres barang jasa tersusun sesuai dengan koordinasi dengan setiap bidang di lingkungan dispermim melalui rapat internal	(1) Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dispermim (2) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan pengadaan barang jasa
8	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 1 sebanyak 3 dokumen penyediaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran iuran jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan ASN, penyediaan dilakukan secara berkala rutin perbulan dan dilakukan pada awal bulan berjalan	Tidak terdapat hambatan, penyediaan gaji dan tunjangan asn terlaksana tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN berjalan lancar dan sesuai jadwal
9	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 1 sebanyak 3 dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana	Belum terdapat hambatan dimana penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd terlaksana sesuai ketentuan	(1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal (2) tidak adanya bagian verifikasi keuangan sehingga penambahan SDM khususnya bagian verifikasi keuangan
10	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	√						Laporan keuangan akhir tahun telah tersusun sesuai schedule penyusunan	Belum terdapat hambatan, penyusunan telah difasilitasi oleh bpkad berupa konsinyering penyusunan laporan keuangan akhir tahun untuk memudahkan koordinasi dan verifikasi laporan keuangan	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi keuangan dispermim dan laporan aset
11	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 1 telah tersusun sebanyak 4 laporan terkait keuangan berupa laporan SPJ keuangan perbulan, laporan DTH, dan pajak	Belum terdapat hambatan, setiap penyusunan laporan berkoordinasi dengan bpkad	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi keuangan dispermim

Pangkalan Bun, 14 Maret 2024
Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi

MUHAMMAD DIYANTO, S.Kom
NIP. 19840116 201001 1 012

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2024 TRIWULAN II

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi
Nama : Muhammad Dhyanta, S.Kom

NO	Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	6 Dok	7 Dok	4 Dok
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	7 Dok	8 Dok

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan 2			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Apr	Mei	Jun			
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		√	√					Rencana kerja perubahan selesai tersusun di triwulan 2 pada bulan Juni menyesuaikan antara dokumen perencanaan untuk tahun dengan dokumen perencanaan jangka menengah	tidak terdapat hambatan	Meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan untuk menjaga keselerasan antara dokumen perencanaan untuk tahun dengan dokumen perencanaan jangka menengah
2	Tertaksananya koordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD			√							
3	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD			√							
4	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	√									
5	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun			√							
6	Tertaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	√	√		√				sampai dengan triwulan 2 telah tersusun 1 laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu, dan laporan disusun berdasarkan data yang telah divalidasi hasil rapat. Pada triwulan 2 ini data yang tersusun pada bulan april adalah dokumen LPPD	Tidak ada hambatan, penyusunan mengacu kepada sistematisa penyusunan yang disampaikan kepada SKPD dan telah divalidasi bersama	(1) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja diperkumunasi perumahan permukiman dan pertanahan (2) Penyusunan laporan dengan menyajikan kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (3) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja diperkumunasi perumahan permukiman dan pertanahan (4) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja diperkumunasi perumahan permukiman dan pertanahan
7	Tertaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	√	√	√	√				Sampai dengan triwulan 2 telah tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu laporan realisasi keuangan dan laporan progres pengadaan barang dan jasa sebanyak 6 dokumen dimana penyusunan laporan dilakukan pada setiap akhir bulan	Laporan riik dan laporan progres barang jasa tersusun sesuai dengan koordinasi dengan setiap bidang di lingkungan dipertum melalui rapat internal	(1) Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperkumunasi perumahan permukiman dan pertanahan (2) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan pengadaan barang jasa

8	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 2 sebanyak 7 dokumen penyediaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran iuran jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan ASN, penyediaan dilakukan secara berkala rutin perbulan dan dilakukan pada awal bulan berjalan	Tidak terdapat hambatan, penyediaan gaji dan tunjangan asn terlaksana tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN berjalan lancar dan sesuai jadwal
9	Terlaksananya pelaksanaan penelausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penelausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 2 sebanyak 6 dokumen penelausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana	Belum terdapat hambatan dimana penelausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd terlaksana sesuai ketentuan	(1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan penelausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal (2) tidak adanya bagian verifikasi keuangan sehingga penambahan SDM khususnya bagian verifikasi keuangan
10	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	√								
11	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	√	√	√	√			Sampai dengan triwulan 2 telah tersusun sebanyak 9 laporan terkait keuangan berupa laporan SPJ keuangan perbulan, laporan DTH, dan pajak	Belum terdapat hambatan, setiap penyusunan laporan berkoordinasi dengan bpkad	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemertuban data dan informasi realisasi keuangan disiperm

Pangkalan Bun, Juni 2024
Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi


MUHAJIRAH DYANTO, S.Kom
NIP. 19840118 201001 1 012

PROGRES RENCANA AKSI ESELON IV TAHUN 2024 TRIWULAN III

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi
Nama : MUHAMAD MALIK, S.IP

NO	Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	5 Dok	7 Dok	4 Dok
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	7 Dok	8 Dok

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan 3			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Jul	Agu	Sep			
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		√	√					rencana kerja perubahan selesai tersusun di triwulan 3 pada bulan agustus menyesuaikan antara dokumen perencanaan untuk tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah	tidak terdapat hambatan	Meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan untuk menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan untuk tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah
2	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD				√				Sampai dengan triwulan 3 rencana kerja anggaran ta 2025 tersusun pada bulan November menyesuaikan kebutuhan dan perencanaan untuk tahun tersebut	adanya pembagian kewenangan antara dinas perkim dan pupr terkait pengelolaan jalan lingkungan yang masih dalam proses pertimbangan dan pembahasan	(1) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan serta rencana kebutuhan barang milik daerah (2) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang-bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan kode belanja
3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD			√					Sampai dengan triwulan 3 rencana kerja perubahan anggaran ta 2024 tersusun pada bulan Agustus menyesuaikan kebutuhan dan perencanaan untuk tahun tersebut	tidak terdapat hambatan	(1) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan serta rencana kebutuhan barang milik daerah (2) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang-bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan kode belanja
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	√									
5	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun			√					Sampai dengan triwulan 3 rencana kerja anggaran perubahan ta 2023 tersusun pada bulan september menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan dana untuk ta 2023	tidak terdapat hambatan	(1) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan serta rencana kebutuhan barang milik daerah (2) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang-bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan kode belanja (3) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan/ pemplotan anggaran kas sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan sesuai kebutuhan setiap bulannya
6	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	√	√	√	√				Sampai dengan triwulan 3 telah tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP yaitu laporan realisasi keuangan dan laporan progres pengadaan barang dan jasa sebanyak 9 dokumen dimana penyusunan laporan dilakukan pada setiap akhir bulan	Laporan rfk dan laporan progres barang jasa tersusun sesuai dengan koordinasi dengan setiap bidang di lingkungan dispermik melalui rapat internal	(1) Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dispermik (2) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan pengadaan barang jasa

PROGRES RENCANA AKSI ESELON IV TAHUN 2024 TRIWULAN IV

Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jabatan : Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran, dan Akuntansi
Nama : MUHAMAD MALIK, S.IP

NO	Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	5 Dok	7 Dok	4 Dok
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	7 Dok	8 Dok

No	Aksi	Indikator	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan 4			Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	Okt	Nov	Des			
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		√	√							
2	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD				√				Sampai dengan triwulan 4 rencana kerja anggaran ta 2025 tersusun pada bulan November menyesuaikan kebutuhan dan perencanaan untuk tahun tersebut	adanya pembagian kewenangan antara dinas perkim dan pupr terkait pengelolaan jalan lingkungan yang masih dalam proses pertimbangan dan pembahasan	(1) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyusunan dokumen penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan serta rencana kebutuhan barang milik daerah (2) Meningkatkan koordinasi dan mencermati usulan dari bidang-bidang untuk meminimalisir kesalahan penempatan kode belanja
3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD			√							
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	√									
5	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun			√							
6	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	√	√	√	√				Sampai dengan triwulan 4 telah tersusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP yaitu laporan realisasi keuangan dan laporan progres pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 dokumen dimana penyusunan laporan dilakukan pada setiap akhir bulan	Laporan rfk dan laporan progres barang jasa tersusun sesuai dengan koordinasi dengan setiap bidang di lingkungan disperkim melalui rapat internal	(1) Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disperkim (2) meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan pengadaan barang jasa

7	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	√									
8	Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	√	√	√	√				Sampai dengan triwulan 4 sebanyak 14 dokumen penyediaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran iuran jaminan kecelakaan, kematian, dan kesehatan ASN, penyediaan dilakukan secara berkala rutin perbulan dan dilakukan pada awal bulan berjalan	Tidak terdapat hambatan, penyediaan gaji dan tunjangan asn terlaksana tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar agar penyediaan gaji dan tunjangan ASN berjalan lancar dan sesuai jadwal
9	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	√	√	√	√				Sampai dengan triwulan 4 sebanyak 268 dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang terlaksana	Belum terdapat hambatan dimana penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd terlaksana sesuai ketentuan	(1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal (2) tidak adanya bagian verifikator keuangan sehingga penambahan SDM khususnya bagian verifikator keuangan
10	Terlaksananya koordinasidan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	√									
11	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun	√	√		√				Sampai dengan triwulan 4 telah tersusun sebanyak 18 laporan terkait keuangan berupa laporan SPJ keuangan perbulan, laporan DTH, dan pajak	Belum terdapat hambatan, setiap penyusunan laporan berkoordinasi dengan bpkad	Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dan informasi realisasi keuangan dispermim

Pangkalan Bun, Desember 2024
Kepala Subbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi

MUHAMAD MALIK, S.IP
NIP: 19840825 200501 1 002

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2024
TRIWULAN I
BULAN : JANUARI,FEBRUARI,MARET

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : KASUBBAG TU
Nama : MUSLICH, S.AP

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I			II	III	IV			
							Januari	Februari	Maret						
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				0	1 Dok	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	0	0	0	0	0	Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan akan terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				0	6 Orang	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (8 Jenis)	√	√	√		0	1 Paket / 3 Jenis	0	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (30 Jenis)	√	√	√	√	0	1 Paket / 8 Jenis	0	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (17 Jenis)	√	√	√		0	1 Paket / 6 Jenis	0	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	0	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	0	0	0	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
9	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				0	0	15 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Mebel dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana 50 % pada TW.I dan selanjutnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
13	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	0	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√	√	√	√	0		2 Unit	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I dan akan dilaksanakan per Triwulan	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

15	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	0	0	10 Unit	0	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Pangkalan Bun, Maret 2024
KASUBBAG TATA USAHA,



MUSLICH,S.AP
NIP. 19681009 199503 1 003

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2023
TRIWULAN II
BULAN : APRIL,MEI,JUNI

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : KASUBBAG TU
Nama : MUSLICH, S.AP

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II			III	IV			
				April	Mei	Juni									
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	0	1 Paket	0	0	0	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan akan terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (8 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	0	1 Paket / 3 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (30 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	0	1 Paket / 8 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (17 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	0	1 Paket / 6 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	0	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	0	4 Lap	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
9	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel telah dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	0	10 Unit	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	0	0	1 Unit	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya perencanaannya telah dilaksanakan TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
13	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√	√	√	√	2 Unit	0	1 Unit	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I dan akan dilaksanakan per Triwulan	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

15	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Pangkalan Bun, Juni 2024
KASUBBAG TATA USAHA,



MUSLICH,S.AP
NIP. 19681009 199503 1 003

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2023
TRIWULAN II
BULAN : APRIL,MEI,JUNI

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : KASUBBAG TU
Nama : MUSLICH, S.AP

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II			III	IV			
				April	Mei	Juni									
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	0	1 Paket	0	0	0	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan akan terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (8 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	0	1 Paket / 3 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (30 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	0	1 Paket / 8 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (17 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	0	1 Paket / 6 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	0	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	0	4 Lap	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
9	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel telah dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	0	10 Unit	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	0	0	1 Unit	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya perencanaannya telah dilaksanakan TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
13	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√	√	√	√	2 Unit	0	1 Unit	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I dan akan dilaksanakan per Triwulan	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

15	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---------	--------	--------	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Pangkalan Bun, Juni 2024
KASUBBAG TATA USAHA,



MUSLICH,S.AP
NIP. 19681009 199503 1 003

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2024
TRIWULAN III
BULAN : JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : KASUBBAG TU
Nama : MUSLICH, S.AP

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan							Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III			IV				
									Juli	Agustus	September					
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	1 Paket	0	0	0	0	Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan telah terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (9 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	1 Paket / 4 Jenis	1 Paket / 1 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (37 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (15 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran	

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	0	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	4 Lap	0	6 Lap	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
9	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit	√				15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel akan dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit		√			0	10 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana 100 % pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	1 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada Perencanaannya Telah terlaksana di TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
13	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	0	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√				5 Unit	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

15	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	10 Unit	0	5 Unit	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara 1 Unit			√		0	0	0	0	1 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada TW.III	Menyesuaikan Kontrak	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

Pangkalan Bun, September 2024
KASUBBAG TATA USAHA,



MUSLICH,S.AP
NIP. 19681009 199503 1 003

PROGRES RENCANA AKSI ESEON IV TAHUN 2024
TRIWULAN IV
BULAN : OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

Unit Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jabatan : KASUBBAG TU
Nama : MUSLICH, S.AP

PROGRES RENCANA AKSI

No	Aksi (Sub Kegiatan)	Indikator (Keluaran DPA)	Jadwal Pelaksanaan				Realisasi Capaian Pelaksanaan Triwulan						Hasil Evaluasi	Hambatan Pencapaian	Strategi Pencapaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV					
										Agustus	September	Desember			
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	√				1 Dok	0	0	0	0	0	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD telah terlaksana pada TW.I	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan 1 Paket		√			0	1 Paket	0	0	0	0	Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan telah terlaksana pada TW.II	-	Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD terlaksana Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang	√				6 Orang	0	0	0	0	0	Pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan menyesuaikan undangan telah tersedia Pada TW.I dengan menyesuaikan Undangan	-	Pelaksanaan Tepat Waktu, Tepat Sasaran dan Tepat Anggaran
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket (9 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 3 Jenis	1 Paket / 4 Jenis	1 Paket / 1 Jenis	0	0	0	Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	-	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 Paket (37 Jenis)	√	√	√	√	1 Paket / 8 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	1 Paket / 10 Jenis	0	1 Paket / 7 Jenis	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket (15 Jenis)	√	√	√		1 Paket / 6 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	1 Paket / 5 Jenis	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket (8 Jenis)	√	√	√	√	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	2 Paket / 2 Jenis	0	2 Paket / 2 Jenis	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah terlaksana TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan dengan kebutuhan rutinitas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26 Laporan	√	√	√		16 Lap	4 Lap	6 Lap	0	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah terlaksana pada TW.I dan jadwal berikutnya akan dilaksanakan pada TW.II dan TW.III MENYESUAIKAN Undangan Rapat Koordinasi	Menyesuaikan Keperluan	Pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
9	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di sediakan 15 Unit		√			15 Unit	0	0	0	0	0	Pengadaan Mebel akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan akan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 Unit	√	√			0	10 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya telah terlaksana 50 % pada TW.I dan selanjutnya akan	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit		√			0	1 Unit	0	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya akan dilaksanakan pada TW.II	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
13	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Laporan	√	√	√	√	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Aliran Kas	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 Unit	√				5 Unit	0	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan dilaksanakan pada TW.I	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran

15	Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit	√	√	√	√	10 Unit	10 Unit	10 Unit	0	5 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan setiap bulan pada TW.I, TW.II, TW.III dan TW.IV	Menyesuaikan Keperluan	Penyediaan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran
----	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	--------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Pangkalan Bun, Desember 2024
KASUBBAG TATA USAHA,



MUSLICH,S.AP
NIP. 19681009 199503 1 003



PEMERINTAHAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.500.000,00	0,00	2.750.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	2.750.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	1.500.000,00	0,00	2.750.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.500.000,00	0,00	2.750.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	1.500.000,00	0,00	2.750.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	1.500.000,00	0,00	2.750.000,00
5	BELANJA DAERAH	33.192.476.000,00	32.003.918.334,00	96,42	16.539.930.175,69
5.1	BELANJA OPERASI	8.039.436.794,00	7.238.932.960,00	90,04	7.339.300.437,68
5.1.01	Belanja Pegawai	3.411.512.938,00	3.327.163.217,00	97,53	3.029.796.356,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.779.194.938,00	1.750.006.616,00	98,36	1.583.274.431,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.261.674.901,00	1.244.300.992,00	98,62	1.128.461.538,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	109.319.000,00	107.638.893,00	98,46	104.630.810,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.660.600,00	90.390.000,00	99,70	87.150.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	112.599.000,00	109.620.000,00	97,35	68.040.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.320.000,00	17.320.000,00	100,00	16.580.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.046.800,00	54.315.000,00	98,67	57.863.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.056.699,00	17.996.309,00	99,67	6.069.164,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.938,00	17.467,00	92,23	13.880,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	104.158.000,00	98.244.445,00	94,32	105.146.576,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.586.000,00	2.540.866,00	98,25	2.329.715,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.755.000,00	7.622.644,00	98,29	6.989.168,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.632.318.000,00	1.577.156.601,00	96,62	1.442.441.925,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	565.204.000,00	542.441.684,00	95,97	526.432.976,50
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.067.114.000,00	1.034.714.917,00	96,96	916.008.948,50
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.267.923.856,00	2.551.769.743,00	78,09	2.376.955.481,68
5.1.02.01	Belanja Barang	885.181.846,00	440.712.900,00	49,79	284.588.127,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	841.901.846,00	397.442.900,00	47,21	275.448.199,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	43.280.000,00	43.270.000,00	99,98	9.139.928,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.480.398.710,00	1.352.521.573,00	91,36	1.469.079.575,68
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	944.122.850,00	876.975.589,00	92,89	863.883.356,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53.715.860,00	51.113.784,00	95,16	48.178.219,68
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.977.700,00	99,98	135.919.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	325.000.000,00	271.894.500,00	83,66	401.098.500,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	57.560.000,00	52.560.000,00	91,31	20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.343.300,00	32.326.000,00	99,95	106.682.434,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.343.300,00	32.326.000,00	99,95	41.782.434,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	64.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	870.000.000,00	726.209.270,00	83,47	516.605.345,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	870.000.000,00	726.209.270,00	83,47	516.605.345,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	100,00	1.907.548.600,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	100,00	1.907.548.600,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	100,00	1.560.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	347.548.600,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.039.436.794,00	7.238.932.960,00	90,04	7.339.300.437,68
5.2	BELANJA MODAL	25.153.039.206,00	24.764.985.374,00	98,46	9.200.629.738,01
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.611.874,00	125.611.874,00	100,00	78.534.650,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.550.874,00	75.550.874,00	100,00	78.534.650,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	55.570.874,00	55.570.874,00	100,00	78.534.650,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.061.000,00	50.061.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	37.181.670,00	37.181.670,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.879.330,00	12.879.330,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.495.423.356,00	1.445.068.050,00	96,63	548.102.906,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.495.423.356,00	1.445.068.050,00	96,63	219.199.374,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.495.423.356,00	1.445.068.050,00	96,63	219.199.374,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	328.903.532,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	328.903.532,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.834.940.687,00	22.517.349.750,00	98,61	8.463.905.712,01
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	20.394.691.109,00	20.142.144.720,00	98,76	7.946.502.468,01
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	19.767.778.109,00	19.544.397.320,00	98,87	7.113.617.422,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	626.913.000,00	597.747.400,00	95,35	832.885.046,01
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.440.249.578,00	2.375.205.030,00	97,33	517.403.244,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.440.249.578,00	2.375.205.030,00	97,33	517.403.244,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	110.086.470,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	110.086.470,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	110.086.470,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	697.063.289,00	676.955.700,00	97,12	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	697.063.289,00	676.955.700,00	97,12	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	697.063.289,00	676.955.700,00	97,12	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	25.153.039.206,00	24.764.985.374,00	98,46	9.200.629.738,01
	JUMLAH BELANJA	33.192.476.000,00	32.003.918.334,00	96,42	16.539.930.175,69
	SURPLUS/DEFISIT	(33.192.476.000,00)	(32.002.418.334,00)	96,41	(16.537.180.175,69)

Kab. Kotawaringin Barat, 26 Februari 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman















Drs. EDY RAHMAN
NIP. 196512251993031009

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

Pangkalan Bun, 23 Januari 2022



No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag Perencanaan/Jabatan Fungsional Perencana	Kabid/Kasubid	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menelaah Surat Bupati tentang LKJIP						Surat Bupati	1 Jam		
2.	Mendisposisi Surat Ke Kasubag Perencanaan/ Jabatan Fungsional Perencana						Disposisi Surat	1 Jam		
3.	Mengumpulkan bahan Penyusunan LKJIP						Bahan Penyusunan, Renstra, RFK, PK, Data Bidang	7 Hari		
4.	Mengetik Konsep LKJIP						Bahan Konsep LKJIP	7 Hari		
5.	Memeriksa Konsep LKIP dan meneruskan ke Sekretaris						Draft LKJIP	1 Hari		
6.	Memeriksa Konsep LKJIP dan meneruskan ke Kepala Badan						Konsep/Hasil periksa draft LKJIP	1 Hari		
7.	Memeriksa Konsep LKJIP						Konsep LKJIP	1 hari		
8.	Menindaklanjuti dan mengirimkan ke Bupati, cq. Bagian Organisasi Sekda Kobar dan Inspektorat						LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Hari		














**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

	Nomor SOP	800/ /PERKIM.I/2022
	Tanggal Pembuatan	09 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	23 Januari 2022
	Disahkan Oleh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat KEPALA DINAS  Drs. EDY RAHMAN NIP. 19651225 199303 1 009
Sub Bagian Program dan Anggaran	Judul SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Ktw.Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Memahami substansi teknis
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kinerja Tahunan; - Perjanjian Kinerja; - Laporan realisasi Fisik dan Keuangan; - Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen RFK 3. Dokumen RKT, PK 4. Laptop, printer 5. Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
LKjIP disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir	File ini disimpan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nomor SOP	900/ 18 /PERKIM.I/2024
	Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	15 Januari 2024
	Tanggal Pengesahan	15 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat  Drs. EDY RAHMAN NIP. 19651225 199303 1 009
Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program	Judul SOP	PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah3. Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam Pengukuran Kinerja2. Memiliki kemampuan menyusun Pengukuran Kinerja3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)3. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja4. SOP Penyusunan LKjIP	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja2. Laptop, printer3. Internet4. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka penyelenggaraan pengukuran kinerja tidak dapat Berjalan secara maksimal.	File ini disimpan di Sub Bagian Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Sekretaris/ Kabid	Kasubbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi	Bidang	Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan membuat pengukuran kinerja						Disposisi pengukuran Kinerja	15 Menit	Disposisi pengukuran Kinerja	Disposisi Kepala Dinas
2.	Memerintahkan membuat pengukuran kinerja						Disposisi pengukuran Kinerja	15 Menit	Disposisi pengukuran Kinerja	Disposisi ke Kasubbag Penyusunan Program, Anggaran dan Akuntansi
3.	Membuat Format pengukuran kinerja						Format pengukuran Kinerja	1 hari	Format pengukuran kinerja	
4.	Menghimpun format pengumpulan data dan pengolahan pengukuran kinerja						Format pengukuran Kinerja	1 hari	Draft pengukuran kinerja	
5.	Membahas dan mengevaluasi data pengukuran kinerja bidang, serta melakukan validasi atas capaian berjenjang setiap pegawai						Draft pengukuran Kinerja	1 hari	Draft pengukuran Kinerja	Data pengukuran Kinerja Staf, JFT, Es IV yang kemudian di validasi Es III
6.	Membuat Konsep dokumen pengukuran kinerja dan mengajukan kepada kepala dinas						Konsep dokumen Pengukuran Kinerja	1 hari	Konsep dokumen	
7.	Memeriksa konsep dokumen pengukuran kinerja untuk melakukan validasi dan saran/upaya tindak lanjut atas capaian kinerja						Konsep dokumen Pengukuran Kinerja	1 hari	Konsep dokumen	Data pengukuran Kinerja Esselon III yang kemudian di validasi kadis
8.	Menandatangani dokumen pengukuran kinerja						Hasil Pengukuran kinerja	1 hari	Dokumen Pengukuran kinerja	
9.	Mendokumentasikan dokumen						Hasil Pengukuran kinerja	15 Menit	Arsip dokumen	

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA**

Pangkalan Bun, 15 Januari 2024



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Memberikan Penghargaan Kepada

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

atas prestasinya sebagai

**SKPD DENGAN PERSENTASE REALISASI PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
PERINGKAT III TAHUN 2024**

PANGKALAN BUN, 10 FEBRUARI 2025



Dr. Drs. H. Budi Santosa, M.Si.



PERSENTASE CAPAIAN P3DN
95,67